

**LATAR BELAKANG MUNCULNYA REVISI KEBIJAKAN
DOKTRIN NUKLIR RUSIA TAHUN 2024**

SKRIPSI



OLEH :

RACHMAT WIRA YUDHA

151220038

JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : Rachmat Wira Yudha

NIM : 151220038

JUDUL SKRIPSI : LATAR BELAKANG MUNCULNYA REVISI KEBIJAKAN
DOKTRIN NUKLIR RUSIA TAHUN 2024

Skripsi ini telah disetujui untuk diujikan Di Jurusan Ilmu Hubungan
Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Yogyakarta

Hari : Rabu

Tanggal : 04 Februari 2026

Pembimbing

Aryanta Nugraha, SIP, M.Si, MA, Ph.D

197503282021211

HALAMAN PENGESAHAN

NAMA : Rachmat Wira Yudha
NIM : 151220038
JUDUL SKRIPSI : LATAR BELAKANG MUNCULNYA REVISI
KEBIJAKAN DOKTRIN NUKLIR RUSIA TAHUN 2024

Skrripsi ini telah dipertahankan dalam ujian pendadaran pada Jurusan Ilmu
Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN
"Veteran" Yogyakarta

Hari : Rabu
Tanggal : 04 Februari 2026
Waktu : 14.30
Tempat : Ruang Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Ketua Sidang/Penguji 1 : Fauzan, M.Si, Ph.D

Pembimbing/Penguji 2 : Aryanta Nugraha, SIP, M.Si, MA, Ph. D

Penguji 3 : Drs. Muharjono, M.Si

Penguji 4 : Agussalim, M.Si, Ph.D



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti saya melakukan kecurangan / penjiplakan / plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yogyakarta, 04 februari 2026
Yang Menyatakan

Rachmat Wira Yudha
NIM 151220038

KATA PENGANTAR

Saya ucapkan Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya yang melimpah sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “LATAR BELAKANG MUNCULNYA REVISI KEBIJAKAN DOKTRIN NUKLIR RUSIA TAHUN 2024”. Tujuan dibuatnya skripsi adalah untuk memenuhi syarat-syarat untuk dapat memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta dan meningkatkan literasi pembaca akademisi Ilmu Hubungan Internasional. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi tidak akan berjalan lancar tanpa dukungan, bimbingan dan kerja sama dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, di antaranya:

1. Allah SWT, yang telah melimpahkan segala berkat, rahmat, dan juga kepintaran kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Kepada bapak dan ibu penulis yang tercinta, Syahrial Unsy dan Rasmayenti. yang selalu menyayangi, memberikan cinta dan membimbing penulis dari kecil hingga sekarang dan selalu menjadi alasan penulis untuk terus berjuang sekaligus memberikan support secara finansial selama penulis berkuliah.
3. Kepada saudara dan saudari yang sangat penulis sayangi, Yolivia Takasyari dan Ilham Wahyudi yang selalu memberikan support dan kasih sayangnya, tempat penulis bercerita dan tentunya juga memberikan semangat ke penulis selama masa kuliah.
4. Bapak Aryanta Nugraha, SIP, M.Si, MA, Ph. D selaku Ketua jurusan Ilmu Hubungan Internasional serta pembimbing penulis, yang selalu membimbing dan memberikan semangat serta solusi kepada penulis dalam proses menulis tugas akhir ini
5. Bapak Fauzan, M.Si, Ph.D selaku penguji 1 penulis.
6. Bapak Drs. Muharjono, M.Si selaku penguji 2 penulis.
7. Bapak Agussalim, M.Si, Ph.D selaku penguji 3 penulis.

8. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada bapak Ganis Kuncoro yang penulis anggap sebagai orang tua sendiri selama di Yogyakarta dan juga memberikan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Kepada seluruh dosen jurusan Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta yang selama ini telah memberikan pengetahuan dan bekerja sama dengan penulis sejak awal menjadi mahasiswa.
10. Penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yaitu “ELPAL” yang didalamnya ada Erik, Delon, Kiky, Raihan, Nopal, Daniel, Afri, Christin, Febi, Zidan, yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan semangat selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Kebersamaan dalam nongkrong memberikan kontribusi penting bagi kelancaran kuliah dan penyelesaian skripsi ini.
11. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada band AMATIR’S (band penulis sendiri) yang didalamnya ada Kiky, Erik, Delon, Ratu, Celine, dan Jean yang telah menjadi penyaluran ekspresi selama proses penyusunan skripsi ini. Kebersamaan dalam bermusik turut memberikan keseimbangan emosional dan semangat bagi penulis.
12. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman teman SUPER BUBUR & etc. yang di dalamnya ada Erik, Delon, Nopal, Daniel, Pepi, Afri, Julia, Kei, Adibah, Ethu, dan Llili yang menjadi kelompok study pertama penulis di masa perkuliahan.
13. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman teman divisi humas pengkaderan HI 24 yaitu “HUMSICK” yang di dalamnya ada Pepi, mas Jaki, Najla, Aya, dan Awa yang meskipun kepanitiaannya berakhirnya sejak lama, namun rasa kekeluargaan yang dibangun untuk selamanya.
14. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Demisioner pimpinan DPM FISIP 2024 yang di dalamnya ada kak Del, Kiky, dan Dinda, yang memberikan teladan, arahan, serta pengalaman berorganisasi yang berharga. Nilai-nilai, pembelajaran, dan dukungan serta rasa kekeluargaan yang dibangun dengan banyak candaan.

15. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kakak tingkat bang Naufal, dan kak Del, yang menjadi teman sekaligus membantu penulis dalam mengerjakan tugas akhir.
16. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yaitu Trok, Raka rang, Puput, Pipoy, Keket, Apuak, Kiki, dan teman teman lainnya dari asal penulis, yang selalu memberikan canda kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
17. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman sedari kecil penulis di kampung yaitu Rifky, Jen, Ryan, Fendri, Rehan, Dozi, Firzi, Zikra, dan Habib juga memberikan semangat dan canda kepada penulis selama masa kuliah ini, meskipun punya jalan yang berbeda.
- 18 Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Almh. nenek Boer dan kakek kakung pemilik Waroeng Cak Boer, yang selama kuliah sudah penulis anggap sebagai kakek dan nenek sendiri, juga memberikan semangat dan doa selama penulis berkuliah.
19. Penulis juga mengucapkan terima kasih Kepada Sal Priadi, SOAD, Baskara Putra, dan Nadin Amizah yang lagu-lagunya telah menemani penulis dalam pengerjaan tugas akhir ini, dan menjadi pengobat penat penulis.
20. Penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) AB.83.184 PRANAN yang telah bekerja sama, berbagi pengalaman, serta memberikan dukungan selama pelaksanaan kegiatan. Kebersamaan dan kerja sama yang terjalin menjadi pengalaman berharga dan turut memberikan kontribusi yang positif bagi penulis.
21. Penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Logistic IIW di dalamnya ada Danang, Raihan, Astrid, Wikan dan Devi, yang memberikan canda tawa dan pengalaman yang berharga penulis mencari pengalaman di luar kampus.
22. Penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman nongkrong lain yang sekarang berada dalam satu proyek yaitu Liminal Void ada Erik, Delon, Kiky, Raihan, Nopal, Daniel, Afri, Christin, Febi, Zidan, Aqil, Ammar, Raul, Piter,

Nares, dan Wildan besar harapan penulis akan keberlanjutan proyek ini, meskipun dimulai di sela-sela penulis mengerjakan tugas akhir.

23. Penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman magang di KBRI Kuala Lumpur yaitu Puput dan Arash kebersamaan serta dukungan selama magang dan disambi dengan penulisan tugas akhir.

24. Penulis mengucapkan terimakasih kepada teman-teman pengajian Mesjid Margo Tunggal, ada pak Ganiz, pak guru Holidi, dan pak Harnadi, yang memberikan dukungan kepada penulis selama penulis berkuliah, dan memberikan pengajaran agama, serta memberika dukungan untuk tugas akhir ini.

Yogyakarta, 04 februari 2026
Yang Menyatakan

Rachmat Wira Yudha
NIM 151220038

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya tulis ini didedikasikan khusus kepada kedua orang tua penulis,
Bapak Syahril
Ibu Rasmayenti
atas kasih sayang, dukungan, serta doa yang tiada hentinya diberikan kepada
penulis sedari kecil hingga sekarang penulis bisa sampai di titik ini.

*"And, when you want something, all the universe conspires in helping you to
achieve it."*

(Paulo Coelho)

“Perjalanan yang jauh kau bangun untuk bertaruh hari belum selesai
biasa saja, kamu tak apa.”

(Hindia)

Maka sudahilah sedihmu yang belum sudah, segera mulailah syukurmu yang pasti
indah, berbahialah bahagialah sudahilah.

(FSTVLST)

Kamu boleh namai itu rumah selama ada mereka yang kamu cinta di dalamnya

(Sal Priadi)

ABSTRAK

Pada 2024, Rusia mengesahkan doktrin nuklir terbarunya setelah revisi doktrin nuklir tahun 2020. Pasca Perang Dingin, telah terjadi beberapa kali evolusi perubahan doktrin nuklir Rusia dalam merespons perubahan lingkungan keamanan internasional yang terus berubah. Penelitian ini menganalisis mengapa Rusia kembali merevisi doktrin nuklirnya pada 2024. Dengan menggunakan kerangka teori persepsi dalam hubungan internasional melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan doktrin nuklir Rusia tidak semata mencerminkan sikap ofensif, melainkan dibingkai sebagai respons defensif terhadap tindakan dan narasi Barat yang dipersepsikan meningkatkan risiko eskalasi konflik strategis, di mana konflik konvensional di Ukraina dipahami sebagai bagian dari persaingan geopolitik jangka panjang antara Rusia dan Barat. Dengan demikian, penyesuaian doktrin nuklir Rusia dapat dipahami sebagai upaya mempertahankan efektivitas *deterrence* dalam menghadapi dinamika keamanan yang terus berubah.

Kata kunci: doktrin nuklir Rusia, persepsi ancaman, NATO, konflik Ukraina.

ABSTRACT

In 2024, Russia ratified its latest nuclear doctrine after the 2020 revision of the nuclear doctrine. In The Post-Cold War, there have been several evolutions of Russian nuclear doctrine in response to the ever-changing international security environment. This study analyzes why Russia revised its nuclear doctrine again in 2024. Using the theoretical framework of perceptions in international relations through a qualitative approach with the literature study method, the results of the study show that the change in Russian nuclear doctrine does not merely reflect an offensive stance, but was framed as a defensive response to Western actions and narratives that are perceived to increase the risk of escalation of strategic conflicts, in which the conventional conflict in Ukraine is understood as part of a long-term geopolitical competition between Russia and the West. Thus, the adjustment of Russia's nuclear doctrine can be understood as an effort to maintain the effectiveness of deterrence in the face of changing security dynamics.

Keywords: *Russia's nuclear doctrine, threat erception, NATO, Ukraine conflict.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	2
HALAMAN PENGESAHAN	3
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	4
KATA PENGANTAR	5
HALAMAN PERSEMBAHAN	9
ABSTRAK	10
ABSTRACT	11
DAFTAR ISI	12
DAFTAR SINGKATAN	15
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Literatur Review	6
D. Landasan Teori	9
E. Argumen Pokok	14
G. Metode Penelitian.....	15
BAB II	19
EVOLUSI DOKTRIN NUKLIR RUSIA DAN LINGKUNGAN KEAMANAN	
RUSIA 2024.....	19
A. Evolusi Doktrin Nuklir Era Putin	19
1. Doktrin Nuklir Tahun 2000.....	20
2. Doktrin Nuklir Tahun 2014	21
3. Doktrin Nuklir Tahun 2020	22
B. Perubahan Doktrin Nuklir 2024 dan Konteks Lingkungan Keamanan	23
1. Doktrin Nuklir 2024	24
1.1 Semakin Meningkatnya Dukungan dan Bantuan Militer-Diplomatik AS dan NATO	27
BAB III	30
PERSEPSI ANCAMAN SEBAGAI LATAR BELAKANG REVISI DOKTRIN	
NUKLIR RUSIA TAHUN 2024.....	30

A. Faktor Citra Barat dalam Revisi Doktrin Nuklir Rusia 2024	30
B. Faktor Persepsi Niat Barat dan NATO dalam Revisi Doktrin Nuklir Rusia 2024	35
C. Faktor Persepsi Tekanan dari Barat dan NATO dalam Pengambilan Keputusan Revisi Doktrin Nuklir Rusia 2024	39
BAB IV	45
KESIMPULAN	45
DAFTAR PUSTAKA	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Wilayah Rusia, Ukraiana, dan Belarus.	5
---	---

DAFTAR SINGKATAN

ATACMS	: <i>Army Tactical Missile System</i>
CSIS	: <i>Center for Strategic and International Studies</i>
INF Treaty	: <i>Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty</i>
NATO	: <i>North Atlantic Treaty Organization</i>
NFU	: <i>No First Use</i>
WMD	: <i>Weapons of Mass Destruction</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada 19 November 2024, Presiden Rusia Vladimir Putin secara resmi menandatangani dekrit yang mengesahkan doktrin nuklir terbaru negara itu. Perlunya revisi dokumen ini, sebelumnya juga sudah disampaikan Putin pada pidato dwitahunan pada Februari 2024 saat dia menyatakan bahwa penggunaan kekuatan nuklir hanya merupakan "pilihan terakhir" untuk mempertahankan kedaulatan negara (Khaira, 2024). Sebelumnya, pada September 2024, Putin mengusulkan perubahan pada doktrin nuklir negara tersebut, dengan mempertimbangkan penggunaan senjata nuklir sebagai respons terhadap serangan oleh negara non-nuklir yang didukung oleh kekuatan nuklir. Perubahan ini juga mencakup kemungkinan memasukkan Belarus di bawah payung pencegahan nuklir Rusia, sejalan dengan penempatan senjata nuklir di wilayah tersebut sejak Juni 2023. (Monde, 2024).

Doktrin ini dikeluarkan beberapa hari setelah dilaporkan bahwa pada 17 November 2024 Presiden AS Joe Biden memutuskan untuk mengizinkan Ukraina menggunakan rudal jarak jauh ATACMS (*Army Tactical Missile Systems*) yang dipasok AS untuk menyerang target yang lebih dalam di Rusia sebagai sarana untuk menggagalkan serangan Rusia yang sedang berlangsung di wilayah Ukraina (Pifer, 2024). Langkah ini merupakan perubahan signifikan dalam kebijakan AS, yang sebelumnya membatasi penggunaan senjata tersebut hanya di wilayah Ukraina. Keputusan ini diambil setelah permintaan berulang dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan sebagai respons terhadap ‘

kemunduran Ukraina di medan perang serta meningkatnya tekanan dari Rusia (Suci Sekarwati, 2024). Selanjutnya, Ukraina meluncurkan rudal jarak jauh ATACMS ke wilayah Rusia pada 19 November 2024 untuk pertama kali, yakni di daerah Bryansk. Serangan ATACMS ke wilayah Bryansk dianggap Rusia sebagai

upaya meningkatkan eskalasi konflik Rusia-Ukraina. Rusia sebelumnya telah memperingatkan bahwa langkah AS tersebut akan mengubah situasi konflik. Menanggapi serangan tersebut, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menuduh Amerika Serikat sengaja memperkeruh situasi dan menyatakan bahwa pelibatan pakar militer AS dalam pengoperasian ATACMS merupakan bentuk keterlibatan langsung dalam konflik. Penggunaan rudal ini oleh Ukraina juga dianggap Rusia sebagai bentuk keterlibatan langsung negara-negara NATO dalam permusuhan terhadap Rusia (EADaily, 2024). Yuri Knutov yang juga sejarawan pertahanan udara Rusia mengatakan, "Ini pada dasarnya adalah tindakan menyatakan perang (oleh negeri- negara NATO-penulis) terhadap negara kita." Knutov menilai bahwa penggunaan rudal tersebut mencerminkan keterlibatan langsung AS dalam konflik, meskipun tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah AS atau Pentagon mengenai izin penggunaan rudal tersebut oleh Ukraina (Islam Times, 2024).

Sebagai reaksi terhadap perkembangan baru penggunaan senjata ATACMS ini, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov dalam konferensi pers di G20 di Rio de Janeiro pada 19 November 2024 menyatakan "Kami akan menganggap ini sebagai wajah baru perang Barat melawan Rusia dan kami akan bereaksi sesuai dengan pemahaman itu". Kemudian dia menambahkan, hal ini merupakan bagian dari skema tiga negara AS, Prancis, dan Inggris untuk secara de facto berperang melawan Rusia dan menuduh Washington mencoba meningkatkan konflik (BBC, 2024).

Doktrin nuklir yang telah diperbarui 2024 ini berjudul "Dasar-Dasar Kebijakan Negara Federasi Rusia di Bidang Penangkalan Nuklir" (bahasa Rusia: *Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания*; bahasa Inggris: *Fundamentals of State Policy of the Russian Federation in the Field of Nuclear Deterrence*). Doktrin Nuklir 2024 ini merupakan revisi atas doktrin nuklir tahun 2020.

Dalam doktrin nuklirnya tahun 2020, Rusia menegaskan peran sentral penangkalan nuklir dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan wilayah Rusia. Rusia

menegaskan bahwa senjata nuklir hanya akan digunakan dalam situasi ekstrem, seperti ancaman langsung terhadap keberadaan negara atau serangan terhadap infrastruktur vital sistem pertahanannya. Doktrin tersebut menggarisbawahi bahwa tujuan utama senjata nuklir adalah untuk mencegah eskalasi konflik dan mengakhiri permusuhan dalam kondisi yang menguntungkan bagi Rusia (Williams, 2024).

Berbeda dengan doktrin nuklir 2020, pada doktrin nuklir 2024 Rusia menyatakan bahwa agresi terhadap Rusia dan sekutunya oleh negara non-nuklir dengan dukungan negara nuklir akan dianggap sebagai serangan bersama. Selain itu, Rusia mungkin menggunakan senjata nuklir dalam ancaman kritis terhadap kedaulatan dan integritas teritorialnya, serta negara sekutunya Belarus (Fundamentals of State Policy of the Russian Federation on Nuclear Deterrence, 2017). Walaupun Ukraina tidak disebutkan secara langsung, arah kebijakan ini jelas menargetkan Kyiv, yang didukung secara militer oleh Amerika Serikat dan negara anggota NATO lainnya.

Doktrin yang direvisi juga mencakup daftar lawan yang terhadapnya pencegahan nuklir diterapkan dan ketentuan penggunaannya, termasuk peluncuran rudal balistik yang menargetkan wilayah Rusia. Jika suatu negara menyediakan wilayah dan sumber dayanya untuk agresi terhadap Rusia, hal itu menjadi dasar bagi pencegahan nuklir negara tersebut (Signs, 2024). Dalam doktrin nuklir Rusia yang diperbarui pada tahun 2024, terdapat perluasan definisi ancaman yang dapat memicu respons nuklir. Tidak hanya serangan langsung yang menjadi pertimbangan, tetapi juga tindakan tidak langsung seperti penyediaan wilayah atau sumber daya oleh suatu negara untuk mendukung agresi terhadap Rusia (Arms Control Association, 2024). Artinya, jika sebuah negara memungkinkan wilayahnya digunakan untuk meluncurkan serangan ke Rusia, negara tersebut dapat dianggap sebagai pihak agresor dan menjadi target pencegahan nuklir. Sebagai contoh, jika sebuah negara anggota NATO mengizinkan penggunaan wilayahnya untuk peluncuran rudal jarak jauh ke Rusia oleh Ukraina atau negara ketiga, Rusia dapat menganggap negara tersebut sebagai target sah dalam konteks pencegahan nuklir. Pendekatan ini menunjukkan adanya perluasan interpretasi ancaman dalam

kebijakan pencegahan Rusia yang bertujuan menciptakan efek jera lebih luas terhadap keterlibatan tidak langsung negara lain.



Gambar 1

(Video Stok Ukraine Russia Belarus Map War Zoom , 2022)

Selain itu, dalam doktrin nuklir 2024 ini Rusia untuk pertama kalinya mencantumkan Belarus secara eksplisit di bawah payung nuklirnya, menegaskan hak untuk menanggapi agresi terhadap kedua negara sebagai anggota Negara Kesatuan. Meskipun Minsk telah lama mendapat jaminan perlindungan melalui Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif atau CSTO (Collective Security Treaty Organization), dukungan nuklir belum pernah tertuang sedetail ini dalam doktrin Moskow hingga kini. Keputusan tersebut mencerminkan kedekatan strategis yang kian erat—terlebih setelah penempatan senjata nuklir taktis Rusia di wilayah Belarus pada tahun ini. (Williams, 2024)

Selain itu, doktrin terbaru memperluas dan memperjelas kondisi penggunaan senjata nuklir. Ambang penggunaan diubah dari “mengancam keberadaan negara” menjadi “ancaman kritis terhadap kedaulatan,” menjadikan ketentuan ini lebih samar dan berpotensi memicu pendekatan “eskalasi untuk de-eskalasi.” Moskow juga menambahkan ketentuan yang menuntut pertanggungjawaban pihak ketiga—termasuk negara non-nuklir yang menerima dukungan militer dari kekuatan nuklir—sebagai agresor bersama. Terakhir, cakupan serangan yang dapat memicu respons nuklir dipanjangkan dari rudal balistik menjadi segala bentuk serangan udara dan antariksa, seperti drone dan

pesawat taktis, menegaskan sinyal tegas terhadap intervensi NATO dalam konflik Ukraina.

Pembaruan doktrin nuklir Rusia pada 2024 ini dipandang oleh beberapa kalangan memunculkan ambiguitas yang tinggi dalam kebijakan strategis negara tersebut. Sebagian kalangan para ahli menafsirkan doktrin baru ini sebagai respons serius terhadap tekanan dari negara-negara Barat dan meningkatnya konflik di Ukraina, khususnya melalui indikasi penurunan ambang batas penggunaan senjata nuklir yang dianggap meningkatkan potensi risiko. Alexander Graef seorang Peneliti senior di Institut Penelitian Perdamaian dan Kebijakan Keamanan Universitas Hamburg, misalnya menyatakan "gambaran besarnya adalah bahwa Rusia menurunkan ambang batas untuk serangan nuklir sebagai respons terhadap kemungkinan serangan konvensional" (Faulconbridge & Kolodyazhnyy, 2024). Sementara ahli lain, Pavel Podvig seorang Pakar kekuatan nuklir Rusia, menyatakan bahwa doktrin baru Rusia memperluas skenario di mana senjata nuklir dapat digunakan. Lebih lanjut Podvig berpendapat bahwa perubahan ini menciptakan ambiguitas yang disengaja untuk mengintimidasi negara-negara Barat dan mencegah mereka meningkatkan dukungan militer kepada Ukraina (Schneider, 2025).

Di sisi lain, ada juga ahli yang berpendapat bahwa revisi ini lebih bersifat simbolik dan bertujuan untuk menciptakan persepsi ancaman atau semacam gertakan, alih-alih menjadi tanda kesiapan nyata untuk melakukan eskalasi militer. Menteri Luar Negeri Ukraina Andriy Sybiga, saat berbicara di Gedung Capitol AS dalam sidang Konggres, menyatakan, "saat ini, kita melihat upaya baru Kremlin untuk menggunakan ancaman nuklir guna menakut-nakuti Barat" (Al-Arabiya, 2024). Senada dengan itu, Rishi Paul, Peneliti Kebijakan Senior di European Leadership Network yang memimpin implementasi proyek-proyek Kebijakan Nuklir, berpendapat bahwa revisi doktrin nuklir Rusia merupakan bagian dari strategi "bluff and bluster" (gertakan dan omong kosong) Putin. Ia menilai bahwa perubahan ini bertujuan untuk memperkuat posisi Rusia dan mencegah keterlibatan

militer Barat lebih lanjut di Ukraina, tanpa benar-benar berniat menggunakan senjata nuklir (Paul, 2024).

Dari paparan di atas, Revisi doktrin nuklir Rusia tahun 2024 muncul sebagai respons terhadap dinamika konflik dan tekanan eksternal yang secara langsung memengaruhi persepsi ancaman strategis Moskow. Langkah ini dianggap sebagai respons terhadap meningkatnya dukungan militer Barat kepada Ukraina, termasuk izin dari Amerika Serikat bagi Ukraina untuk menggunakan rudal jarak jauh ATACMS ke wilayah Rusia, serta keterlibatan militer Barat secara tidak langsung, menciptakan kekhawatiran di Kremlin akan terjadinya agresi gabungan.

Hal ini mendorong Rusia untuk memperbarui kerangka kebijakan nuklirnya agar mencakup skenario ancaman baru, termasuk serangan oleh negara non-nuklir yang didukung kekuatan nuklir. Dengan memasukkan elemen-elemen tersebut ke dalam doktrin resmi, Rusia tidak hanya menyesuaikan diri dengan realitas geopolitik terkini, tetapi juga mengirimkan pesan peringatan strategis terhadap upaya intervensi lebih jauh oleh negara-negara Barat.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka dapat ditarik pertanyaan yaitu Apa yang melatarbelakangi revisi kebijakan doktrin nuklir Rusia tahun 2024?

C. Literatur Review

Analisa mengenai evolusi doktrin nuklir Rusia dari waktu ke waktu, pada umumnya memanfaatkan analisis historis dalam konteks geopolitik. Misalnya, artikel oleh Polina Sinovets dan Bettina Renz yang berjudul *“Russia’s 2014 Military Doctrine and Beyond: Threat Perceptions, Capabilities and Ambitions”* mengkaji perubahan signifikan dalam doktrin militer Rusia, terutama dalam menanggapi persepsi ancaman dari NATO, Barat, dan perubahan geopolitik wilayah Eropa Timur (Sinovets & Renz, 2015). Artikel ini menyoroti bagaimana doktrin militer 2014 tidak hanya bersifat defensif, tetapi memperluas fokusnya terhadap ancaman baru, seperti intervensi asing di sekitar perbatasan Rusia, penggunaan pasukan non- nuklir dan perang hibrida. Sinovets dan Renz menyoroti

bahwa doktrin tersebut menempatkan modernisasi kemampuan militer, terutama dalam domain elektronik dan pertahanan udara, sebagai respons terhadap ancaman kombinasi antara NATO dan konflik proxy. Mereka menyatakan bahwa aspek ini memperlihatkan ambisi Rusia untuk mempertahankan deteksi dan kapasitas respon cepat guna menjaga superioritas wilayahnya.

Lebih lanjut, penulis menunjukkan bahwa meskipun doktrin menegaskan bahwa penggunaan senjata nuklir hanya akan dilakukan sebagai respons terhadap ancaman eksistensial, doktrin juga mencakup sinyal "escalate-to-de-escalate" melalui kombinasi antara non-nuklir dan retorika strategis yang agresif. Hal ini menunjukkan bahwa ambiguitas tetap dipertahankan dalam kebijakan nuklir Rusia sebagai elemen deterrence politik dan strategi militer yang fleksibel. Sinovets dan Renz juga menekankan bahwa latihan militer yang semakin intensif dan skenario operasional yang melibatkan berbagai bentuk perang (konvensional, non-konvensional, dan nuklir terbatas) menunjukkan peningkatan komitmen praktis Rusia terhadap doktrin tersebut—bahkan jika secara tertulis masih ada pendekatan defensif.

Artikel oleh Olga Oliker yang berjudul *"Russia's Nuclear Doctrine: What We Know, What We Don't, and What That Means"* menegaskan bahwa Rusia secara sistematis menjaga ambiguitas dalam kebijakan nuklirnya untuk menciptakan efek deterrence strategis (Oliker, 2016). Oliker mengelompokkan elemen doktrin ke dalam tiga lapis: narasi resmi, sinyal strategis, dan praktik yang tertutup dalam dokumen rahasiayang kesemuanya melayani tujuan taktis dan geopolitik. Dalam artikelnya, Oliker menyatakan bahwa meskipun Rusia menegaskan bahwa ambang penggunaan senjata nuklir masih tinggi (hanya dalam respons terhadap ancaman eksistensial), doktrin sebenarnya mengandung celah yang disengaja. Misalnya, dokumen strategi nuklir formal tahun 2014 dan "Foundations of State Policy on Nuclear Deterrence" menyebut bahwa nuklir bertujuan untuk "mencegah eskalasi dan mengakhirinya dalam kondisi yang dapat diterima oleh Federasi Rusia atau sekutunya". Kalimat ini mencerminkan pendekatan "escalate-to-de-escalate", sebuah sinyal strategis yang secara implisit menurunkan ambang threshold nuklir. Oliker juga menyoroti modernisasi kekuatan

nuklir Rusia sebagai sinyal kesiapan, bukan indikasi perubahan doktrin secara substantif. Penekanan pada sistem seperti Iskander, torpedo nuklir, dan glide hypersonik dianggap lebih sebagai strategi intimidasi daripada janji penggunaan nuklir nyata. Lebih lanjut, Olier memperingatkan bahwa latihan militer seperti Zapad 2009 dan Vostok 2010 yang mencakup simulasi skenario nuklir, bukan sekadar latihan defensif, tetapi juga alat sinyal kepada Barat bahwa Rusia siap menggunakan opsi nuklir dalam skenario terbatas.

Artikel lain, yang ditulis oleh Robert M. Gates yang berjudul “*Russia’s Evolving Nuclear Doctrine and its Implications*”, berpendapat bahwa Rusia secara bertahap memodifikasi doktrin nuklirnya untuk menyesuaikan dengan persepsi ancaman dari NATO dan Barat, serta untuk memperkuat efek deterensi dalam menghadapi tekanan geopolitik (Gates, 2016). Artikel ini menunjukkan bahwa Rusia mengembangkan pendekatan berbasis ambiguitas strategis, yaitu dengan tidak menetapkan secara tegas ambang batas penggunaan senjata nuklir. Ambiguitas ini bertujuan menciptakan ketidakpastian di kalangan lawan potensial, sehingga memperkuat pencegahan melalui ketakutan akan respons nuklir yang tidak dapat diprediksi. Rusia membuka kemungkinan penggunaan senjata nuklir sebagai tanggapan terhadap agresi oleh negara non-nuklir yang didukung oleh kekuatan nuklir, termasuk dalam konteks konflik di Ukraina.

Ketiganya artikel di atas memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana senjata nuklir diposisikan dalam strategi pertahanan Rusia, evolusi doktrin dari masa ke masa, serta faktor-faktor eksternal yang memengaruhi perubahan kebijakan tersebut. Dengan menggabungkan analisis historis, konteks geopolitik, dan pendekatan teoritis, literatur-literatur ini memperkuat pemahaman terhadap bagaimana persepsi ancaman khususnya dari negara-negara Barat telah mendorong Rusia untuk memperluas cakupan penggunaan senjata nuklir sebagai bentuk pencegahan dan tekanan strategis.

Namun demikian, belum terdapat literatur yang secara khusus membahas mengenai revisi kebijakan doktrin nuklir Rusia tahun 2024. Kajian yang ada

umumnya hanya menjelaskan perkembangan umum strategi dan postur nuklir Rusia tanpa mengulas secara mendalam konteks dan alasan spesifik di balik perubahan kebijakan pada tahun tersebut. Penelitian yang akan dilakukan dalam skripsi ini terfokus secara menyeluruh untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mendorong Rusia merevisi doktrin nuklirnya pada 2024, dengan mempertimbangkan dinamika konflik dan perubahan kebijakan dari aktor-aktor eksternal yang berpengaruh.

D. Landasan Teori

Penelitian ini akan memanfaatkan konsep persepsi sebagai alat analisa. Dalam studi Hubungan Internasional (HI), persepsi merupakan salah satu konsep kunci yang digunakan untuk memahami bagaimana negara mengambil keputusan, merespons ancaman, dan membentuk aliansi. Negara-negara tidak selalu bertindak berdasarkan realitas objektif, melainkan pada interpretasi mereka terhadap realitas tersebut. Dengan kata lain, cara suatu negara memandang niat, kekuatan, dan tindakan negara lain sering kali lebih menentukan kebijakan luar negeri daripada fakta-fakta empiris itu sendiri. Oleh karena itu, persepsi menjadi alat analisis penting untuk menjelaskan dinamika sistem internasional yang kompleks dan penuh ketidakpastian Jervis, 1976).

Persepsi dipandang sebagai salah satu fondasi utama dalam memahami perilaku aktor negara. Persepsi menjembatani realitas objektif dan keputusan subjektif: negara bertindak bukan hanya berdasarkan fakta-fakta konkret, tetapi terutama atas dasar bagaimana mereka menafsirkan atau mempersepsikan realitas tersebut. Seperti dijelaskan oleh Snyder, Bruck, dan Sapin (1954), kebijakan luar negeri tidak dapat dijelaskan hanya dengan mengacu pada struktur sistem internasional, tetapi harus dianalisis melalui cara para pengambil keputusan memandang dan menafsirkan lingkungan strategis mereka (Kahn, 1960).

Jack Snyder menekankan pentingnya “strategic culture” sebagai lensa perseptual yang digunakan oleh negara dalam membaca lingkungan internasional. Persepsi negara dibentuk oleh pengalaman historis, budaya strategis, dan elite

politik yang mendefinisikan siapa kawan dan siapa lawan (Snyder, 1977). Sementara itu, dalam perspektif konstruktivis, Alexander Wendt menegaskan bahwa struktur internasional bersifat intersubjektif dan dibentuk oleh persepsi bersama antaraktor, bukan sekadar hasil kekuatan material (Wendt, 1992).

Di antara para pemikir yang secara mendalam membahas peran persepsi dalam hubungan internasional, Robert Jervis menjadi salah satu yang paling berpengaruh karena memberikan kerangka analitis yang sistematis dan mendalam mengenai bagaimana persepsi, bias kognitif, dan kesalahan interpretasi dapat membentuk kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam bukunya *Perception and Misperception in International Politics* (1976), Jervis menjelaskan bahwa para pengambil keputusan cenderung menafsirkan informasi sesuai dengan keyakinan awal mereka, dan hal ini dapat menyebabkan distorsi persepsi terhadap niat maupun tindakan negara lain. Teori Jervis menonjol karena menggabungkan pendekatan psikologi kognitif dengan analisis strategis, sehingga mampu menjelaskan tidak hanya *apa* yang dilakukan negara, tetapi juga *mengapa* mereka sampai pada keputusan tertentu berdasarkan persepsi yang salah atau bias (Jervis, 1976, hlm. 9-11).

Robert Jervis, melalui karyanya *Perception and Misperception in International Politics* (1976), menjelaskan bahwa persepsi merupakan salah satu aspek kunci yang memengaruhi cara negara merespons lingkungan strategis dan kebijakan luar negeri negara lain. Persepsi sangat memengaruhi cara negara bertindak di panggung internasional karena kebijakan luar negeri tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi objektif, seperti kekuatan militer atau posisi geografis, tetapi juga oleh bagaimana aktor menafsirkan informasi yang tersedia. Melalui persepsi, para pengambil keputusan di tingkat negara membentuk, mempertahankan, dan mengubah pandangan mereka terhadap aktor lain dalam sistem internasional.

Menurut Jervis, persepsi tidak selalu mencerminkan realitas objektif. Sering kali terdapat jarak antara kenyataan dan cara para pengambil kebijakan melihat dunia, dan jarak ini bersifat sistematis, bukan kebetulan. Menurut Jervis,

"Perceptions of the world and of other actors diverge from reality in patterns that we can detect and for reasons that we can understand" (Jervis, 1976, hlm. 3). Tidak heran, dalam banyak kasus, kesalahan persepsi (*misperception*) dapat menyebabkan konflik, kesalahan kalkulasi, atau kebijakan yang kontraproduktif.

Lebih lanjut, Jervis mengintegrasikan temuan-temuan dari psikologi kognitif dan sosial ke dalam teori hubungan internasional. Ia mengkritik pendekatan-pendekatan tradisional yang menganggap bahwa aktor negara selalu bertindak secara rasional berdasarkan informasi yang objektif.

Jervis berpendapat bahwa (1976, p.4-5):

- a. Persepsi sering dipengaruhi oleh harapan, keyakinan sebelumnya, dan kecenderungan untuk mempertahankan konsistensi kognitif.
- b. Aktor cenderung menyesuaikan informasi baru agar sesuai dengan pandangan yang telah dimiliki sebelumnya (fenomena *assimilation bias*).
- c. Dalam konteks ambigu atau tekanan tinggi, kecenderungan untuk membuat kesimpulan cepat justru meningkat, sering kali menghasilkan interpretasi yang keliru.

Robert Jervis juga mengidentifikasi berbagai dimensi penting dalam teori persepsi yang dapat membantu menjelaskan perilaku negara-negara dalam sistem internasional. Pertama, pembentukan dan pemeliharaan citra suatu negara atau pemimpinnya terhadap negara lain terbentuk dari pengalaman historis, sistem nilai, ideologi, dan representasi kultural. Begitu citra terbentuk, hal sangat sulit diubah bahkan oleh informasi yang kontradiktif. Citra ini berfungsi sebagai lensa persepsi yang memengaruhi bagaimana tindakan negara lain diinterpretasikan. Misalnya, jika suatu negara sudah dicitrakan sebagai agresor, maka tindakan defensifnya pun bisa dianggap sebagai provokasi (Field, 2020).

Kedua, bias asimilasi (*assimilation bias*), yakni aktor cenderung mengasimilasi informasi baru agar selaras dengan kepercayaan yang sudah ada. Ketika informasi bertentangan dengan keyakinan, aktor cenderung meragukan validitas informasi tersebut daripada mengubah keyakinannya. *"People assimilate*

incoming information into their pre-existing images (Jervis, 1976, hlm. 143). Pernyataan ini menjelaskan mengapa keputusan luar negeri bisa terus keliru meskipun informasi yang benar tersedia.

Ketiga, *underestimation dan overestimation of intentions*, yang berarti bahwa aktor sering keliru dalam memperkirakan niat negara lain. Misalnya, menganggap negara lain lebih terorganisir dan rasional daripada kenyataannya (*overestimation of centralization*), atau menyalahartikan respons terhadap tindakan sendiri sebagai aksi agresif (*fundamental attribution error*), dan bahkan mengabaikan fakta bahwa pihak lawan mungkin melihat situasi dari perspektif yang sangat berbeda. (Jervis, 1976, hlm. 319-326).

Keempat, kognisi dalam situasi tekanan tinggi, yakni dalam kondisi darurat seperti krisis militer atau diplomatik, kemampuan kognitif pengambil keputusan sangat terbatas, Mereka cenderung menyederhanakan realitas yang kompleks, Mereka lebih mungkin bertumpu pada intuisi, bukan analisis rasional yang menyeluruh, Keputusan sering diambil berdasarkan skema mental yang sudah ada. (Jervis, 1976, hlm. 187- 191).

Kelima, pengaruh persepsi terhadap strategi, yaitu bahwa persepsi tentang niat negara lain sangat menentukan pilihan strategi. Jika suatu negara mempersepsikan pihak lain sebagai agresor, ia akan cenderung menggunakan strategi deterensi (pencegahan dengan kekuatan). Sebaliknya, jika melihat pihak lain sebagai defensif, ia mungkin lebih memilih strategi rekonsiliasi. (Jervis, 1976, hlm. 90-126)

Berdasarkan beberapa dimensi di atas, Jervis tidak menganggap bahwa semua pengambil kebijakan adalah irasional, tetapi ia menekankan bahwa bahkan aktor yang cerdas sekalipun dapat membuat keputusan yang keliru jika dasar persepsinya salah. Sebaliknya, ia menekankan bahwa bahkan aktor yang cerdas dan berpengalaman pun dapat membuat keputusan strategis yang keliru apabila dasar persepsinya terhadap realitas salah. Kesalahan tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh kurangnya informasi, tetapi lebih karena kecenderungan

manusiawi seperti konsistensi kognitif, bias asimilasi, serta tekanan dalam situasi krisis yang mendorong penyederhanaan kompleksitas realitas (Jervis, 1976, hlm. 143, 187–191).

Revisi doktrin nuklir Rusia pada tahun 2024 turut dipengaruhi oleh dinamika geopolitik yang berkembang, khususnya keputusan Amerika Serikat yang mengizinkan Ukraina untuk menggunakan sistem rudal jarak jauh ATACMS (Army Tactical Missile System) terhadap wilayah Rusia. Kebijakan ini tidak hanya dilihat sebagai bentuk dukungan militer, tetapi dipersepsikan Moskow sebagai tindakan agresif yang mengarah pada keterlibatan langsung dalam konflik. Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov, dalam sebuah briefing pers resmi di Kremlin, Pada 11 September 2024 menyebutkan bahwa keputusan Washington untuk mengizinkan penggunaan rudal ATACMS menunjukkan “keterlibatan langsung Barat dalam konflik” dan menjadi faktor penting dalam penyesuaian strategi pertahanan Rusia (*Le Monde*, 2024). Dalam pernyataan terpisah, pada 25 September 2024, dalam pertemuan Dewan Keamanan Rusia yang disiarkan secara langsung, Presiden Vladimir Putin juga menyampaikan bahwa Rusia akan merevisi pendekatan nuklirnya karena “ancaman yang meningkat dari aliansi Barat dan tindakan agresif terhadap kedaulatan Rusia” (Faulconbridge & Kolodyazhnyy, 2024).

Pernyataan ini ditegaskan kembali oleh Sergei Ryabkov, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, menyatakan Dalam sebuah briefing resmi Kremlin pada 18 November 2024 bahwa penggunaan rudal jarak jauh seperti ATACMS terhadap wilayah kedaulatan Rusia “akan dianggap sebagai partisipasi langsung Amerika Serikat dalam permusuhan” dan bahwa “kami akan mengambil langkah yang diperlukan sebagai tanggapan” (Ahdiat, 2024).

Persepsi ini kemudian menjadi dasar justifikasi bagi revisi doktrin nuklir Rusia tahun 2024, termasuk dimasukkannya klausul yang memungkinkan penggunaan senjata nuklir terhadap negara non-nuklir yang wilayahnya digunakan untuk menyerang Rusia. Ini sejalan dengan pandangan Robert Jervis (2017), Jervis menggabungkan pendekatan psikologi kognitif dengan analisis strategis,

menjelaskan bahwa pengambil keputusan sering kali menafsirkan informasi melalui lensa keyakinan awal, bukan fakta objektif, sehingga berpotensi mendistorsi persepsi tentang niat dan tindakan negara lain (Jervis, 1976, hlm. 28-32).

E. Argumen Pokok

Penyesuaian doktrin nuklir Rusia pada tahun 2024 dilakukan sebagai respons terhadap memburuknya lingkungan keamanan yang dipersepsikan semakin mengancam akibat keterlibatan militer Barat, khususnya Amerika Serikat dan NATO, dalam konflik Rusia–Ukraina. Dukungan Barat berupa penyediaan senjata canggih dan peningkatan peran NATO dipahami Rusia sebagai tindakan bermusuhan yang dapat meningkatkan eskalasi konflik dari level konvensional ke tingkat strategis. Dalam situasi tersebut, Rusia memandang senjata nuklir sebagai alat utama untuk menjaga keamanan nasional, mengendalikan eskalasi konflik, dan merespons ancaman yang dianggap semakin serius dan bersifat eksistensial.

F. Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mendorong revisi doktrin nuklir Rusia pada tahun 2024. Secara khusus, penelitian ini ingin mengkaji bagaimana persepsi ancaman terutama terhadap keterlibatan militer Barat dalam konflik Rusia Ukraina menjadi dasar utama dalam perubahan kebijakan strategis Rusia. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan bagaimana perubahan ini mencerminkan evolusi strategi pencegahan nuklir yang semakin luas dan ambigu. Diharapkan, penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pemahaman mengenai dinamika kebijakan pertahanan Rusia, serta memperkaya literatur akademik dalam bidang studi keamanan dan hubungan internasional kontemporer.

2. Manfaat

Penelitian berjudul “*Latar Belakang Munculnya Revisi Kebijakan Doktrin Nuklir Rusia Tahun 2024*” memiliki beberapa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

a) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman terhadap teori persepsi dalam Hubungan Internasional, khususnya sebagaimana dikembangkan oleh Robert Jervis. Dengan fokus pada kasus Rusia, penelitian ini membuktikan bagaimana persepsi terhadap niat dan tindakan negara lain dapat mendorong perubahan signifikan dalam doktrin strategis. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya diskusi akademik tentang interaksi antara persepsi ancaman, doktrin militer, dan dinamika geopolitik di kawasan Eurasia. Hal ini menjadi penting dalam mengembangkan analisis teoretis tentang bagaimana negara-negara merespons tekanan eksternal melalui adaptasi kebijakan pertahanan.

b) Manfaat untuk Studi Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk studi- studi berikutnya terkait kebijakan nuklir, konflik Rusia–Ukraina, dan strategi pertahanan negara-negara besar. Kajian ini dapat digunakan sebagai rujukan dalam analisis kebijakan luar negeri berbasis persepsi, serta memperluas penerapan teori persepsi terhadap konflik kontemporer. Studi ini juga mendorong penelitian lanjutan mengenai bagaimana negara-negara menggunakan ambiguitas strategis dalam menyusun doktrin militer, khususnya dalam konteks hubungan kekuatan besar, seperti antara Rusia, NATO, dan Amerika Serikat. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai strategis bagi pengembangan literatur HI, studi keamanan internasional, dan kebijakan luar negeri.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri sebagai metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata, baik tertulis maupun lisan, dari individu serta perilaku yang dapat diamati. Hal tersebut diungkapkan oleh Bogdan dan Taylor dalam Moleong (Moleong, 2010). Sehingga metode penelitian kualitatif ini dapat memungkinkan interpretasi data yang disajikan secara deskriptif, guna memperoleh hasil penelitian yang menggambarkan fakta-fakta yang ada serta menjawab pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu pengumpulan data dari sumber-sumber sekunder. Data diperoleh dari literatur yang relevan seperti buku-buku akademik, jurnal ilmiah, laporan resmi kebijakan luar negeri Rusia, analisis lembaga think-tank, serta sumber berita terpercaya internasional. Penelusuran data juga mencakup dokumen-dokumen publik seperti doktrin militer Rusia, pernyataan resmi pemerintah, dan artikel yang dipublikasikan oleh lembaga penelitian strategis seperti RAND Corporation, Carnegie Moscow Center, dan Center for Strategic and International Studies (CSIS). Selain itu, referensi juga diperoleh dari situs resmi pemerintah Rusia dan lembaga-lembaga kebijakan pertahanan yang menyediakan informasi mengenai revisi kebijakan strategis Rusia dalam konteks konflik Ukraina dan pengaruh Barat.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif-deskriptif. Menurut Sugiyono (2016), metode ini digunakan untuk meneliti objek dalam kondisi alamiah, dengan tujuan mendeskripsikan fenomena secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh. Data yang telah dikumpulkan dari berbagai

sumber akan dianalisis melalui proses reduksi, kategorisasi, interpretasi, dan penyusunan kesimpulan. Analisis difokuskan pada bagaimana Rusia membingkai ancaman terhadap negaranya melalui persepsi strategis, dan bagaimana hal tersebut tercermin dalam revisi doktrin nuklir tahun 2024. Data yang dianalisis mencakup pernyataan elit politik dan militer Rusia, konteks geopolitik kontemporer, serta kajian akademik mengenai strategi pencegahan dan penggunaan kekuatan militer dalam doktrin nuklir. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah secara logis dan sistematis.

H. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini akan memusatkan perhatian pada revisi doktrin nuklir Rusia yang terjadi pada tahun 2024. Pemilihan periode ini didasarkan pada munculnya pernyataan dan indikasi resmi dari pemerintah Rusia yang menunjukkan adanya pergeseran signifikan dalam kebijakan strategis pertahanannya, khususnya melalui dimasukkannya klausul baru yang memungkinkan penggunaan senjata nuklir terhadap negara non-nuklir apabila wilayahnya digunakan untuk menyerang Rusia. Perubahan ini tidak hanya merefleksikan respons terhadap perkembangan konflik militer Rusia–Ukraina, tetapi juga dipengaruhi oleh persepsi ancaman yang dibentuk oleh elite keamanan dan politik Rusia terhadap keterlibatan negara-negara Barat, terutama NATO. Tahun 2024 menjadi momen penting yang menandai transformasi pendekatan pencegahan nuklir Rusia dari yang bersifat reaktif menjadi lebih proaktif dan ambigu. Dengan menetapkan jangkauan waktu pada tahun ini, penelitian ini diharapkan dapat lebih terfokus dalam menganalisis faktor-faktor pendorong revisi kebijakan tersebut serta implikasinya terhadap stabilitas kawasan dan hubungan internasional, sekaligus memberikan ruang untuk penerapan teori persepsi dalam Hubungan Internasional sebagai landasan analitis utama.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian akan dibagi menjadi beberapa bab yang akan dikembangkan menjadi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I, berisikan tentang penjelasan dari pendahuluan yang dibuat seperti latar belakang dari judul yang ditentukan, rumusan masalah, kerangka pemikiran,

BAB II, membahas latar belakang historis dan politik dari perubahan doktrin nuklir Rusia tahun 2024. Fokus diberikan pada Presiden Vladimir Putin dan konflik Rusia–Ukraina, ketegangan dengan NATO.

Bab III, menjelaskan bagaimana persepsi ancaman yang dimiliki pemerintahan Rusia (elit politik yaitu Presiden dan Menteri kemanan) dalam memengaruhi revisi kebijakan nuklir. Dengan menggunakan teori persepsi dari Robert Jervis.

BAB IV, menjelaskan mengenai kesimpulan dari keseluruhan pembahasan pada penelitian tersebut.

BAB II

EVOLUSI DOKTRIN NUKLIR RUSIA DAN LINGKUNGAN KEAMANAN RUSIA 2024

Bab ini membahas evolusi doktrin nuklir Rusia di era kepemimpinan Vladimir Putin serta keterkaitannya dengan dinamika lingkungan keamanan yang terus berubah hingga tahun 2024. Fokus utama bab ini adalah menelusuri bagaimana perubahan persepsi ancaman, khususnya dalam hubungan Rusia dengan Amerika Serikat dan NATO, memengaruhi perumusan serta revisi kebijakan nuklir Rusia secara bertahap.

Pembahasan diawali dengan analisis terhadap doktrin militer dan nuklir Rusia pada tahun 2000, 2014, dan 2020, yang menunjukkan pola adaptasi strategis terhadap memburuknya lingkungan keamanan eksternal. Ketiga dokumen tersebut memperlihatkan konsistensi Rusia dalam mempertahankan senjata nuklir sebagai instrumen utama penangkalan, sekaligus menunjukkan adanya pergeseran dalam definisi ancaman dan kondisi penggunaan senjata nuklir.

Selanjutnya, bab ini menguraikan perubahan doktrin nuklir tahun 2024 dalam konteks eskalasi perang Rusia–Ukraina serta meningkatnya keterlibatan Amerika Serikat dan NATO. Dengan menempatkan revisi doktrin 2024 dalam kerangka lingkungan keamanan yang lebih luas, bab ini bertujuan menunjukkan bahwa perubahan tersebut bukanlah kebijakan yang berdiri sendiri, melainkan respons strategis terhadap dinamika keamanan yang semakin konfrontatif. Dengan demikian, analisis pada bab ini menjadi landasan untuk memahami revisi doktrin nuklir 2024 sebagai produk interaksi antara faktor internal Rusia dan tekanan eksternal yang berkembang secara progresif.

A. Evolusi Doktrin Nuklir Era Putin

Sebelum terjadinya revisi tahun 2024, doktrin nuklir Rusia telah mengalami beberapa tahap perkembangan penting di era Vladimir Putin, yakni pada tahun 2000, 2014, dan 2020. Ketiga periode tersebut menunjukkan pola adaptasi yang bertahap terhadap perubahan lingkungan keamanan internasional yang semakin kompleks, terutama memburuknya hubungan Rusia dengan Amerika Serikat dan NATO.

Perubahan-perubahan yang dilakukan pada periode tersebut tidak selalu bersifat radikal, namun secara konsisten memperkuat peran senjata nuklir sebagai instrumen utama penangkalan strategis Rusia. Pada satu sisi, terdapat revisi yang bersifat konseptual dan redaksional, seperti penegasan ulang persepsi ancaman dan klarifikasi prinsip penggunaan. Di sisi lain, terdapat pula perubahan yang lebih substantif, khususnya dalam memperluas interpretasi ancaman terhadap eksistensi negara sebagai dasar legitimasi penggunaan senjata nuklir.

Untuk memahami perkembangan tersebut dengan lebih jelas, bagian berikut akan membahas setiap revisi doktrin sebelum 2024 secara berurutan. Pembahasan dimulai dari doktrin tahun 2000 sebagai titik awal perubahan kebijakan nuklir di era Putin, kemudian revisi tahun 2014 yang muncul dalam konteks meningkatnya ketegangan dengan Barat setelah krisis Ukraina, dan dilanjutkan dengan dokumen tahun 2020 yang memperjelas kondisi penggunaan senjata nuklir. Melalui uraian ini, akan terlihat bagaimana perubahan lingkungan keamanan memengaruhi kebijakan nuklir Rusia dari waktu ke waktu.

1. Doktrin Nuklir Tahun 2000

Pada awal kepemimpinan Vladimir Putin, Rusia melakukan pergeseran penting dalam doktrin militernya dari pendekatan defensif menuju konsep *active deterrence*. Doktrin Militer Rusia tahun 2000 disusun sebagai respons terhadap perubahan lingkungan keamanan pasca-Perang Dingin yang ditandai oleh ketidakpastian strategis, konflik regional, serta tekanan eksternal dari negara-negara Barat. Doktrin ini membahas secara komprehensif sifat perang modern, ancaman internal dan eksternal, organisasi serta pendanaan militer, hingga prinsip penggunaan kekuatan militer Rusia, termasuk aspek teknis, politik, sosial, dan ekonomi (Hippel, 2000).

Salah satu perubahan paling signifikan adalah perluasan kondisi penggunaan senjata nuklir. Jika sebelumnya senjata nuklir diposisikan terutama sebagai alat pembalasan atas serangan nuklir, doktrin 2000 membuka kemungkinan penggunaannya sebagai respons terhadap agresi konvensional berskala besar yang mengancam keberlangsungan negara. Dengan demikian, ambang batas penggunaan nuklir menjadi lebih rendah dibandingkan era sebelumnya. Selain itu, senjata nuklir juga dapat digunakan untuk merespons serangan dengan senjata pemusnah massal (WMD) lainnya (Bleek, 2000). Doktrin ini menegaskan kembali peran sentral senjata nuklir dalam menjamin keamanan nasional Rusia. Rusia

menyatakan haknya untuk menggunakan senjata nuklir tidak hanya dalam konteks pembalasan, tetapi juga ketika eksistensi negara terancam oleh agresi konvensional besar-besaran. Pandangan ini mencerminkan persepsi ketimpangan kekuatan konvensional antara Rusia dan NATO, sehingga senjata nuklir dipandang sebagai kompensasi strategis utama.

Menurut V. Manilov, Wakil Kepala Staf Umum Pertama Angkatan Bersenjata Rusia, doktrin ini dirancang agar fleksibel dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis. Keamanan militer ditempatkan sebagai inti doktrin, dengan cakupan yang lebih luas dari sekadar pertahanan teritorial. Konsep ini mencakup upaya preventif, identifikasi dini ancaman, serta penggunaan seluruh sumber daya negara untuk mencegah konflik bersenjata (Sokov, 1999). Dengan demikian, pada periode awal Putin, fondasi kebijakan nuklir Rusia mulai bergerak ke arah deterrence yang lebih aktif dan permisif.

2. Doktrin Nuklir Tahun 2014

Doktrin Militer Rusia 2014 mengidentifikasi ekspansi NATO sebagai ancaman utama terhadap keamanan nasional Rusia. Selain itu, Rusia memandang pengembangan sistem pertahanan rudal strategis, senjata non-nuklir strategis, dan senjata presisi tinggi sebagai faktor yang merusak keseimbangan strategis nuklir. Doktrin ini juga menyoroti pentingnya domain baru peperangan, seperti siber, perang elektronik, dan militerisasi ruang angkasa (Reif, 2018).

Perubahan doktrin 2014 bersifat editorial namun substantif. Istilah “pelemahan konfrontasi ideologis” digantikan dengan penegasan bahwa kompetisi global semakin meningkat. NATO tidak lagi dipandang sekadar berniat mendekatkan infrastruktur militernya, tetapi telah secara nyata melakukannya. Teknologi seperti *Prompt Global Strike* dan pengerahan senjata di luar angkasa disebut secara eksplisit sebagai ancaman. Konflik Ukraina juga dimasukkan sebagai faktor ancaman strategis, termasuk keberadaan rezim di negara tetangga yang dianggap merugikan kepentingan Rusia (Podvig, 2014).

Dalam konteks nuklir, Rusia mempertahankan hak untuk menggunakan senjata nuklir sebagai respons terhadap serangan nuklir, WMD, maupun agresi konvensional besar yang mengancam eksistensi negara. Keputusan penggunaan senjata nuklir sepenuhnya berada di tangan Presiden Rusia, dengan tujuan memberikan “kerugian yang tidak dapat diterima” kepada agresor potensial (Putin, 2014). Doktrin 2014 juga menandai perubahan cara pandang Rusia terhadap perang modern. Rusia menekankan konsep *competition period*, yaitu fase antara damai dan perang terbuka, di mana instrumen non-militer seperti

tekanan politik, ekonomi, psikologis, dan informasi digunakan secara intensif. Pendekatan ini mencerminkan strategi perang hibrida yang mengaburkan batas antara militer dan non-militer.

Faktor internal doktrin 2014 mencakup upaya memperkuat kemampuan konvensional, mempertahankan status sebagai kekuatan besar, serta menjaga stabilitas politik domestik dari pengaruh eksternal. Faktor eksternal didominasi oleh ekspansi NATO, krisis Ukraina, dan meningkatnya ancaman non-tradisional seperti perang informasi dan serangan siber (Sinovets & Renz, 2014). Perdebatan akademik pun muncul. Adamsky (2015) menilai doktrin ini adaptif dan defensif sebagai bentuk *cross-domain deterrence*. Sebaliknya, Schneider (2015) berpendapat bahwa doktrin ini menurunkan ambang penggunaan nuklir melalui strategi *escalate to de-escalate* yang berisiko terhadap stabilitas global.

3. Doktrin Nuklir Tahun 2020

Pada tahun 2020, Rusia menerbitkan dokumen khusus berjudul *Basic Principles of State Policy of the Russian Federation on Nuclear Deterrence*. Dokumen ini memperjelas kondisi penggunaan senjata nuklir dan menegaskan bahwa kebijakan nuklir Rusia bersifat defensif. Empat kondisi utama penggunaan nuklir meliputi: peluncuran rudal balistik terhadap Rusia atau sekutunya; penggunaan senjata nuklir atau WMD; serangan terhadap fasilitas pemerintah atau militer kritis yang mengancam kemampuan respons nuklir; serta agresi konvensional besar yang mengancam eksistensi negara (Hans, 2022; Putin, 2020).

Doktrin ini menempatkan senjata nuklir sebagai bagian integral dari kebijakan negara yang mencakup aspek militer, politik, diplomatik, ekonomi, dan informasi. Presiden Rusia menjadi otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan nuklir, sementara lembaga negara lainnya berperan dalam implementasi kebijakan deterrence. Unsur ketidakpastian tetap dipertahankan sebagai bagian dari strategi pencegahan (Hans, 2022). Secara internal, doktrin 2020 bertujuan meningkatkan kejelasan, konsistensi, dan kontrol kebijakan nuklir dengan meningkatkan transparansi doktrinal. Secara eksternal, doktrin ini merupakan respons terhadap tekanan Barat, khususnya NATO, serta upaya mengurangi risiko mispersepsi strategis oleh negara lain (Bugos, 2020; Topychkanov, 2020). Pandangan pro dikemukakan oleh Sokov (2020) dan Pifer (2020), yang menilai doktrin ini sebagai langkah menuju stabilitas dan transparansi strategis, bukan ekspansi peran senjata nuklir.

Perkembangan doktrin nuklir Rusia pada tahun 2000, 2014, dan 2020 menunjukkan pola evolusi yang bertahap namun konsisten dalam strategi keamanan Rusia di era Vladimir Putin. Doktrin 2000 menandai pergeseran penting dengan memperluas kemungkinan penggunaan senjata nuklir, termasuk sebagai respons terhadap agresi konvensional besar yang mengancam eksistensi negara. Kebijakan ini mencerminkan upaya Rusia mengompensasi kelemahan kekuatan konvensional pasca-Perang Dingin serta merespons ekspansi NATO. Pada 2014, dalam konteks krisis Ukraina dan meningkatnya ketegangan dengan Barat, Rusia kembali menegaskan NATO sebagai ancaman utama dan memperluas spektrum ancaman hingga mencakup dimensi non-militer, meskipun prinsip dasar penggunaan nuklir secara formal tetap dipertahankan.

Sementara itu, doktrin 2020 lebih berfokus pada klarifikasi dan penegasan prinsip penangkalan nuklir melalui perincian empat kondisi penggunaan senjata nuklir. Langkah ini bertujuan meningkatkan transparansi, konsistensi, dan kredibilitas deterrence di tengah melemahnya rezim pengendalian senjata global. Secara keseluruhan, ketiga doktrin tersebut menunjukkan bahwa senjata nuklir tetap diposisikan sebagai pilar utama keamanan nasional Rusia, sekaligus instrumen strategis untuk menjaga keseimbangan kekuatan dan mengelola risiko eskalasi dalam lingkungan keamanan yang semakin kompetitif dan konfrontatif.

B. Perubahan Doktrin Nuklir 2024 dan Konteks Lingkungan Keamanan

Revisi doktrin nuklir Rusia tahun 2024 merupakan perkembangan terbaru dalam evolusi kebijakan nuklir Rusia di era Vladimir Putin. Berbeda dengan revisi sebelumnya yang lebih banyak menegaskan atau memperjelas prinsip yang sudah ada, perubahan tahun 2024 muncul dalam situasi perang Rusia–Ukraina yang telah berlangsung intens dan melibatkan dukungan militer besar dari Amerika Serikat serta NATO kepada Ukraina. Kondisi ini menciptakan tingkat konfrontasi yang belum pernah terjadi sebelumnya antara Rusia dan Barat sejak akhir Perang Dingin.

Dalam konteks tersebut, doktrin 2024 tidak hanya berfungsi sebagai dokumen kebijakan pertahanan, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk merespons dinamika konflik yang terus berkembang. Rusia menilai bahwa keterlibatan negara-negara Barat—meskipun tidak secara langsung mengirim pasukan tempur—telah meningkatkan risiko eskalasi strategis. Oleh karena itu, penyesuaian doktrin dipandang sebagai langkah untuk

memperkuat daya tangkal dan memberikan sinyal tegas terhadap kemungkinan perluasan konflik.

Pembahasan pada bagian ini akan menguraikan latar belakang perubahan doktrin 2024, bentuk revisi yang dilakukan, serta implikasinya terhadap ambang penggunaan senjata nuklir dan stabilitas keamanan kawasan maupun global. Dengan demikian, revisi 2024 dapat dipahami sebagai refleksi dari perubahan lingkungan keamanan yang semakin konfrontatif dan kompleks.

1. Doktrin Nuklir 2024

Pada November 2024, Rusia menerbitkan versi terbaru doktrin nuklirnya yang secara luas dipandang menurunkan ambang penggunaan senjata nuklir. Doktrin ini muncul dalam konteks perang Rusia Ukraina dan meningkatnya keterlibatan militer Barat. Rusia secara eksplisit menyatakan hak menggunakan senjata nuklir terhadap negara non-nuklir yang didukung oleh negara nuklir, yang dipandang sebagai serangan bersama (Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia, 2024). Doktrin 2024 juga memperluas legitimasi penggunaan pertama senjata nuklir sebagai respons terhadap ancaman terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Rusia dan Belarus.

Penekanan berulang pada konsep ini dinilai sangat permisif dan berpotensi meningkatkan risiko eskalasi nuklir (Saradzhyan, 2024; Schneider, 2025). Dokumen dan latihan militer rahasia yang terungkap menunjukkan bahwa ambang penggunaan senjata nuklir taktis Rusia lebih rendah daripada yang diakui secara publik, termasuk penggunaan untuk efek psikologis dan intimidasi (Seddon & Cook, 2024). Doktrin ini juga mencerminkan upaya Rusia menetapkan norma yang memungkinkan serangan konvensional besar dengan perlindungan ancaman eskalasi nuklir.

Salah satu elemen paling signifikan dalam doktrin 2024 adalah penegasan bahwa Rusia berhak menggunakan senjata nuklir terhadap negara non-nuklir apabila negara tersebut bertindak dengan partisipasi atau dukungan negara nuklir. Ketentuan ini menyatakan bahwa agresi oleh negara non-nuklir yang didukung kekuatan nuklir diperlakukan sebagai serangan bersama, sehingga membuka ruang pembalasan nuklir Rusia terhadap pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat (Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia, 2024; Rescheto, 2024). Ketentuan ini dipandang sebagai perluasan *de facto* terhadap kebijakan jaminan keamanan negatif Rusia sebelumnya.

Doktrin 2024 juga menempatkan ancaman terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Rusia serta Belarus—sebagai bagian dari *Union State*—sebagai dasar sah penggunaan pertama senjata nuklir, bahkan dalam konteks agresi konvensional. Penyertaan Belarus secara eksplisit merupakan unsur baru yang memperluas cakupan geografis dan politik dari deterrence nuklir Rusia (Saradzhyan, 2024). Penekanan berulang terhadap konsep kedaulatan ini dinilai sangat permisif, karena definisi ancaman terhadap kedaulatan bersifat luas dan tidak terdefinisi secara ketat (Schneider, 2025). Selain itu, doktrin ini memasukkan skenario eskalasi nuklir sebagai respons terhadap serangan udara dan antariksa berskala besar, termasuk penggunaan pesawat strategis, rudal jelajah, senjata hipersonik, dan kendaraan udara nirawak yang melintasi perbatasan Rusia. Formulasi ini secara langsung mencerminkan karakter peperangan modern non-kontak dan memberikan justifikasi normatif bagi eskalasi nuklir dalam fase awal konflik konvensional (Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia, 2024).

Sejumlah laporan intelijen dan dokumen rahasia yang dianalisis oleh *Financial Times* menunjukkan bahwa dalam latihan militer teaternya, Rusia telah lama mempraktikkan ambang penggunaan senjata nuklir taktis yang jauh lebih rendah dibandingkan yang diakui secara publik. Senjata nuklir taktis bahkan diproyeksikan digunakan untuk menciptakan efek psikologis dan intimidasi, termasuk terhadap negara-negara yang secara formal bukan musuh Rusia (Seddon & Cook, 2024).

Secara strategis, doktrin nuklir Rusia 2024 tidak dapat dilepaskan dari tujuan politik Kremlin untuk menekan Barat agar mengakui kembali wilayah pengaruh Rusia di kawasan bekas Uni Soviet dan Eropa Timur. Ancaman eskalasi nuklir dipandang sebagai instrumen koersif untuk melemahkan solidaritas NATO dan memaksa kompromi strategis dari Amerika Serikat dan sekutunya. Dengan demikian, doktrin ini mencerminkan pergeseran dari deterrence defensif menuju deterrence koersif yang memadukan ancaman nuklir dengan tekanan politik dan militer konvensional.

Perubahan doktrin nuklir Rusia tahun 2024 terutama dipicu oleh eskalasi signifikan perang Rusia–Ukraina yang memasuki fase perang berkepanjangan dan semakin melibatkan aktor eksternal, khususnya Amerika Serikat dan NATO. Sejak 2022, konflik ini berkembang dari operasi militer terbatas menjadi perang dengan intensitas tinggi yang ditopang oleh dukungan militer Barat dalam skala besar kepada Ukraina (International Affairs, 2025). Bagi Rusia, situasi ini mengindikasikan pergeseran konflik dari perang regional menjadi konfrontasi strategis tidak langsung dengan negara-negara nuklir Barat. Dalam konteks tersebut, doktrin nuklir dipandang perlu disesuaikan untuk mencerminkan

realitas medan konflik yang semakin kompleks dan berisiko tinggi, di mana batas antara konflik konvensional dan ancaman strategis menjadi semakin kabur (CSIS, 2024).

Peristiwa konkret yang secara langsung mendorong revisi doktrin nuklir 2024 adalah keputusan Amerika Serikat dan sekutunya untuk mengizinkan Ukraina menggunakan senjata jarak jauh dan presisi tinggi, termasuk rudal balistik taktis, terhadap target di wilayah Rusia (Reuters, 2024). Dari sudut pandang Moskow, kebijakan ini dipersepsikan sebagai bentuk keterlibatan langsung Barat dalam konflik, meskipun dilakukan melalui aktor non-nuklir. Oleh karena itu, doktrin 2024 memperkenalkan konsep bahwa serangan oleh negara non-nuklir yang didukung atau difasilitasi oleh negara nuklir dapat dikategorikan sebagai “serangan gabungan,” yang berpotensi memicu respons nuklir Rusia. Perubahan ini mencerminkan upaya Rusia untuk memperluas cakupan penggentaran nuklirnya guna menahan eskalasi lebih lanjut dari pihak Barat (CSIS, 2024).

Selain faktor operasional di medan perang, revisi doktrin nuklir tahun 2024 juga dipengaruhi oleh tekanan militer konvensional yang dihadapi Rusia selama konflik Ukraina. Sejumlah analisis menunjukkan bahwa kinerja militer konvensional Rusia tidak selalu memenuhi ekspektasi awal, sehingga meningkatkan ketergantungan Rusia pada instrumen strategis, termasuk senjata nuklir, sebagai alat kompensasi kelemahan relative (Szaboles, 2025). Dalam konteks ini, perubahan doktrin tidak semata-mata didorong oleh ambisi ofensif, melainkan oleh kebutuhan strategis untuk mempertahankan kredibilitas penggentaran di tengah tantangan militer yang nyata. Dengan kata lain, doktrin 2024 dapat dipahami sebagai “doktrin karena kebutuhan,” yang muncul akibat tekanan struktural dan operasional yang dihadapi Rusia dalam konflik berkepanjangan (Stefanovich, 2025).

Lebih jauh, revisi doktrin nuklir tahun 2024 juga memiliki dimensi komunikasi strategis yang kuat. Pernyataan resmi Kremlin dan publikasi doktrin baru dirancang sebagai sinyal politik kepada Barat bahwa eskalasi lebih lanjut akan membawa risiko strategis yang serius. Dengan menurunkan ambang batas penggunaan nuklir dan memperluas definisi ancaman eksistensial, Rusia berupaya menciptakan efek pencegah yang lebih kuat terhadap negara-negara pendukung Ukraina. Dalam hal ini, doktrin nuklir 2024 tidak hanya berfungsi sebagai panduan operasional militer, tetapi juga sebagai instrumen diplomasi koersif untuk membentuk perilaku lawan dan mengendalikan eskalasi konflik.

1.1 Semakin Meningkatnya Dukungan dan Bantuan Militer-Diplomatik AS dan NATO

Konflik Rusia–Ukraina tidak hanya merupakan perang antara dua negara, tetapi juga berkembang menjadi krisis keamanan internasional yang melibatkan aktor-aktor besar, terutama Amerika Serikat dan NATO. Sejak aneksasi Krimea pada tahun 2014 hingga eskalasi penuh pada tahun 2022, keterlibatan AS dan NATO menunjukkan dinamika yang semakin intens, baik dalam bentuk dukungan militer, bantuan ekonomi, koordinasi diplomatik, maupun penerapan sanksi terhadap Rusia. Keterlibatan ini pada satu sisi dipahami sebagai upaya mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina, namun pada sisi lain dipersepsikan Rusia sebagai bentuk intervensi tidak langsung yang memperluas dimensi konflik.

Peran AS dan NATO juga mencerminkan perubahan dalam arsitektur keamanan Eropa pasca-Perang Dingin. NATO kembali menegaskan fungsi pertahanan kolektifnya, sementara Amerika Serikat memimpin koordinasi respons Barat terhadap agresi Rusia. Dukungan yang diberikan dirancang untuk memperkuat kapasitas pertahanan Ukraina tanpa melibatkan pasukan NATO secara langsung di medan perang, guna menghindari eskalasi langsung antara kekuatan nuklir.

Amerika Serikat dan NATO memainkan peran yang sangat sentral dalam menyediakan dukungan militer kepada Ukraina sejak eskalasi konflik dengan Rusia, khususnya setelah invasi besar-besaran Rusia pada Februari 2022. Dukungan ini tidak hanya mencerminkan komitmen Barat terhadap pertahanan Ukraina, tetapi juga merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk menahan agresi Rusia tanpa terlibat langsung dalam konflik bersenjata. Bantuan militer yang diberikan mencakup sistem persenjataan canggih, seperti senjata anti-tank dan pertahanan udara, dukungan intelijen real-time, pelatihan personel militer Ukraina, serta bantuan logistik dan pemeliharaan sistem senjata. Namun, seluruh bentuk dukungan ini secara konsisten dikalibrasi untuk menghindari keterlibatan langsung pasukan NATO di medan perang Ukraina, mengingat risiko eskalasi horizontal menuju konflik langsung antara NATO dan Rusia (Frederick et al., 2022).

Dari perspektif kebijakan Amerika Serikat, bantuan militer kepada Ukraina dipandang sebagai instrumen utama untuk meningkatkan kapasitas pertahanan Ukraina sekaligus memperlemah kemampuan Rusia mencapai tujuan militernya. Akan tetapi, Frederick et al. (2022) menekankan bahwa setiap peningkatan bantuan militer selalu disertai perhitungan risiko eskalasi, terutama kemungkinan Rusia menafsirkan bantuan

Barat sebagai keterlibatan langsung NATO (Frederick et al., 2022). Oleh karena itu, pengambilan keputusan di Washington menunjukkan pola bertahap (*incrementalism*), di mana jenis dan skala bantuan disesuaikan dengan dinamika konflik serta respons Rusia di lapangan. Pendekatan ini mencerminkan dilema strategis AS antara kebutuhan untuk membantu Ukraina secara efektif dan keharusan mencegah eskalasi yang dapat mengarah pada konflik antar-kekuatan nuklir.

Dalam konteks aliansi, NATO berfungsi sebagai kerangka politik dan strategis yang memungkinkan negara-negara anggota memberikan bantuan militer secara terkoordinasi. NATO tidak bertindak sebagai aktor tempur langsung, tetapi sebagai forum konsultasi dan koordinasi kebijakan yang menyelaraskan respons kolektif Barat. Reorientasi NATO kembali pada prinsip pertahanan kolektif pasca-2014 memperkuat legitimasi bantuan militer kepada Ukraina, sembari menegaskan batas yang jelas antara dukungan tidak langsung dan keterlibatan langsung dalam perang. Pendekatan ini memungkinkan negara-negara anggota memperluas arus bantuan militer sambil mempertahankan postur defensif aliansi dan menghindari pelanggaran terhadap komitmen dasar NATO untuk tidak berperang langsung dengan Rusia (US, Ukraine Crisis, and NATO, n.d.)

Selain bantuan militer, Amerika Serikat dan NATO menjadikan instrumen diplomatik dan tekanan ekonomi sebagai pilar utama dalam merespons konflik Rusia–Ukraina. Diplomasi aliansi difokuskan pada menjaga persatuan politik internal NATO serta membangun pesan deterrence yang konsisten terhadap Rusia. Amerika Serikat berperan sebagai aktor kunci dalam mengoordinasikan posisi negara-negara anggota, mengingat perbedaan tingkat ancaman, ketergantungan energi, dan kepentingan strategis di antara lebih dari tiga puluh negara anggota NATO. Menjaga kohesi ini dipandang sebagai prasyarat utama efektivitas respons Barat, sekaligus sebagai mekanisme untuk menghindari langkah-langkah sepihak yang dapat memicu eskalasi tidak terkendali (US, Ukraine Crisis, and NATO, n.d.).

Peran Amerika Serikat dan NATO dalam konflik Rusia–Ukraina menunjukkan bahwa perang ini telah berkembang menjadi krisis keamanan internasional yang melampaui dimensi bilateral. Sejak 2014 dan semakin intens setelah 2022, AS dan NATO terlibat secara aktif melalui dukungan militer, bantuan ekonomi, koordinasi diplomatik, serta penerapan sanksi terhadap Rusia. Dukungan tersebut dirancang untuk memperkuat kapasitas pertahanan Ukraina dan menahan agresi Rusia, namun tetap dikalibrasi agar tidak melibatkan pasukan NATO secara langsung guna menghindari eskalasi terbuka antara

kekuatan nuklir. Di sisi lain, Rusia memandang keterlibatan ini sebagai bentuk intervensi tidak langsung yang memperluas dan memperdalam konflik.

Secara strategis, keterlibatan AS dan NATO juga mencerminkan penegasan kembali peran NATO sebagai aliansi pertahanan kolektif dalam arsitektur keamanan Eropa pasca-Perang Dingin. Melalui pendekatan bertahap (*incrementalism*), bantuan militer dan tekanan ekonomi diberikan dengan mempertimbangkan risiko eskalasi, sementara diplomasi diarahkan untuk menjaga kohesi internal aliansi. Dengan demikian, respons Barat terhadap konflik ini tidak hanya bertujuan mendukung Ukraina, tetapi juga menjaga stabilitas kawasan dan mengelola risiko konfrontasi langsung dengan Rusia.

Jika ditarik secara kronologis sejak 2014 dan semakin intens pasca-2022, keterlibatan Amerika Serikat dan NATO dalam konflik Rusia–Ukraina menunjukkan peningkatan bertahap dari dukungan politik dan sanksi ekonomi menuju bantuan militer canggih, termasuk sistem senjata jarak jauh yang mampu menjangkau wilayah Rusia. Pola peningkatan ini, yang oleh Barat dimaksudkan sebagai dukungan defensif tanpa keterlibatan langsung, dalam persepsi Moskow dipandang sebagai perluasan konfrontasi strategis dengan negara-negara nuklir. Dalam konteks tersebut, revisi doktrin nuklir Rusia tahun 2024 tampak bukan sebagai kebijakan yang berdiri sendiri atau semata-mata tiba-tiba, melainkan sebagai respons terhadap akumulasi tekanan lingkungan keamanan yang semakin konfrontatif, di mana menguatnya dukungan Amerika Serikat dan NATO menjadi faktor situasional utama yang membentuk perubahan ambang dan formulasi penggunaan senjata nuklir Rusia.

BAB III

PERSEPSI ANCAMAN SEBAGAI LATAR BELAKANG REVISI DOKTRIN NUKLIR RUSIA TAHUN 2024

Bab ini berargumen bahwa revisi doktrin nuklir Rusia tahun 2024 tidak dapat dilepaskan dari konstruksi persepsi ancaman yang berkembang di lingkaran elite pengambil keputusan Rusia, khususnya di bawah kepemimpinan Vladimir Putin sebagai Presiden Federasi Rusia dan institusi pertahanan negara yang berada di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan Rusia. Dengan kata lain, perubahan doktrin bukan semata respons struktural terhadap dinamika sistem internasional, melainkan juga refleksi dari bagaimana ancaman dipersepsikan, ditafsirkan, dan dikonstruksikan oleh aktor utama negara.

Dalam sistem politik Rusia yang sangat terpusat, Presiden memegang otoritas tertinggi dalam penetapan kebijakan keamanan dan penggunaan senjata nuklir, sementara Kementerian Pertahanan berperan dalam menerjemahkan persepsi ancaman tersebut ke dalam perencanaan strategis dan doktrin operasional. Oleh karena itu, analisis pada bab ini menempatkan persepsi Presiden dan elite militer sebagai variabel kunci dalam menjelaskan perubahan doktrin nuklir 2024. Persepsi terhadap Barat khususnya NATO dan Amerika Serikat tidak hanya membentuk retorika politik, tetapi juga memengaruhi ambang penggunaan senjata nuklir dan formulasi kebijakan penangkalan.

Untuk menjelaskan proses tersebut, bab ini menggunakan kerangka lima dimensi persepsi dari Robert Jervis dalam *Perception and Misperception in International Politics* (1976), yaitu pembentukan citra, *underestimation and overestimation of intentions*, kognisi dalam situasi tekanan tinggi, serta pengaruh persepsi terhadap strategi. Melalui pendekatan ini, bab ini akan menunjukkan bahwa revisi doktrin nuklir 2024 merupakan hasil interaksi antara tekanan lingkungan keamanan eksternal dan konstruksi persepsi ancaman di tingkat kepemimpinan politik dan militer Rusia. Dengan demikian, fokus analisis diarahkan pada bagaimana Presiden dan institusi pertahanan Rusia memaknai tindakan Barat sebagai ancaman eksistensial yang memerlukan penyesuaian doktrin nuklir negara.

A. Faktor Citra Barat dalam Revisi Doktrin Nuklir Rusia 2024

Konsepsi citra (*image*) dalam hubungan internasional dipahami sebagai konstruksi persepsi yang terbentuk dalam pikiran aktor terhadap pihak lain, yang

berfungsi sebagai lensa untuk menafsirkan tindakan dan niat mereka dalam hubungan antar bangsa (Jervis, 1976). Citra suatu negara atau pemimpinnya terhadap negara lain terbentuk dan terpelihara melalui pengalaman historis, berdasarkan sistem nilai, ideologi, dan representasi kultural. Pada umumnya, begitu citra terbentuk, hal sangat sulit diubah bahkan oleh informasi yang kontradiktif sekalipun. Citra ini berfungsi sebagai lensa persepsi yang memengaruhi bagaimana tindakan negara lain diinterpretasikan. Misalnya, jika suatu negara sudah dicitrakan sebagai agresor, maka tindakan defensifnya pun bisa dianggap sebagai provokasi (Field, 2020).

Secara umum, Rusia mencitrakan Barat sebagai musuh dan sebagai ancaman yang eksistensial yang dominan. Sergey Lavrov, diplomat senior dan Menteri Luar Negeri Rusia berpendapat bahwa Barat, khususnya Amerika Serikat dan NATO, merupakan ancaman eksistensial bagi Rusia karena dianggap terus berusaha melemahkan pengaruh Rusia melalui ekspansi NATO, sanksi ekonomi, dan dukungan militer terhadap Ukraina, yang menurutnya merupakan kelanjutan dari pola historis ketidakpercayaan dan pengkhianatan Barat sejak masa Tsar hingga pasca-runtuhnya Uni Soviet (Anand, 2025).

Jika pernyataan Lavrov menggambarkan ancaman Barat dari perspektif diplomatik, Andrei Belousov memperkuat narasi tersebut dari sudut pandang militer. Belousov, Menteri Pertahanan Rusia era Putin, mengatakan bahwa Barat merupakan ancaman dominan bagi Rusia karena dianggap berupaya mempertahankan hegemoni global dengan merusak stabilitas regional melalui sanksi, tekanan militer, serta dukungan terhadap negara-negara yang berkonflik dengan Rusia (Xinhua, 2024). Ia juga menyebut bahwa tindakan Barat bukan sekadar kompetisi geopolitik, tetapi langkah sistematis untuk menjaga superioritasnya dengan menekan kekuatan Rusia dan negara-negara sekutunya, sehingga Rusia perlu memperkuat kemampuan pertahanan dan kebijakan keamanan nasionalnya. Pernyataan Belousov menegaskan narasi bahwa ancaman dari Barat bersifat kolektif dan berskala global, sekaligus menunjukkan bahwa pandangan

tersebut tidak hanya datang dari diplomasi Rusia, tetapi juga dari struktur pertahanan dan militer negara (Xinhua, 2024).

Citra Barat sebagai ancaman yang eksistensial dan dominan bagi Rusia seperti yang telah disebutkan sebelumnya, terbentuk dari berbagai faktor. Faktor utama terbentuknya citra tersebut adalah faktor sejarah. Di masa Perang Dingin, pemerintahan Soviet menjadikan AS sebagai acuan untuk menilai tingkat kemajuan ekonomi dan kekuatan militer mereka pada saat yang sama mereka menganggap AS sebagai lawan ideologis dan meramalkan keruntuhannya (Jönsson 1984). Setelah Perang Dingin, hubungan Rusia dan Barat terutama AS sempat membaik namun hanya sementara. Rusia dan Barat ini diposisikan sebagai pihak yang sekaligus dapat menjadi sekutu maupun lawan (Shevtsova 2003: 338). Pada awal 1990-an, Rusia berharap bahwa mengadopsi model politik dan ekonomi Barat akan membawa stabilitas dan kemakmuran, namun masa transisi justru menghasilkan krisis sosial dan ekonomi yang berat. Dari sini muncul keyakinan bahwa Barat tidak pernah berniat menjadikan Rusia sebagai mitra sejajar, melainkan sebagai negara yang harus dilemahkan atau diarahkan. Keinginan untuk tetap menjaga hubungan dengan AS sering diringkas dalam ungkapan “suka atau tidak suka” (Petersson 2001), yang mencerminkan tingkat ambivalensi yang tinggi. Di satu pihak, AS dipandang rendah dan bahkan dibenci; namun di pihak lain, negara itu tetap menjadi objek kekaguman, meski dengan rasa enggan. Dalam praktiknya cara AS menampilkan kekuatan di panggung internasional, negara ini justru menjadi model acuan bagi Rusia selama dan setelah masa Perang Dingin (Trenin 2007: 98).

Di era Putin, Barat kembali dicitrakan menjadi sebagai ancaman yang eksistensial. Selama dua masa jabatan awal Vladimir Putin, sejumlah pengamat mencatat munculnya retorika yang semakin menonjol di Rusia yang menggambarkan Amerika Serikat sebagai ancaman keamanan yang kembali menguat (Mendelson dan Gerber, 2008). Berbagai persoalan politik dan ekonomi di Rusia pun semakin kerap dikaitkan dengan campur tangan musuh dari luar maupun dari dalam negeri. Cara pandang ini berbeda tajam dari era Yeltsin, ketika

perhatian utama lebih tertuju pada ancaman domestik seperti kecenderungan disintegrasi, gerakan separatis, dan kejahatan terorganisir (Petersson, 2001).

Dalam beberapa tahun terakhir, wacana politik Rusia kembali dipenuhi narasi-narasi tentang pengepungan oleh kekuatan asing, bahaya pengaruh luar, serta tuduhan bahwa aktor eksternal berupaya ikut campur dalam urusan domestik Rusia sebuah pola yang mengingatkan pada gambaran klasik masa kekacauan (Petersson, 2001). Kritik Barat mengenai demokrasi dianggap penuh kemunafikan, karena Rusia melihat bahwa nilai-nilai tersebut sering digunakan sebagai alat politik, bukan prinsip universal. Ketika 'Revolusi Berwarna' terjadi di Georgia serta Ukraina, Kremlin melihatnya sebagai bukti upaya Barat mengganti rezim yang menghalangi kepentingannya. Dalam pandangan Rusia, tindakan Barat di Ukraina dengan adanya penggulingan Yanukovich pada 2014 dipahami bukan sebagai dinamika domestik, tetapi sebagai rekayasa geopolitik untuk memperluas pengaruh Barat ke wilayah yang secara historis dianggap berada dalam orbit keamanan Rusia (Gotz, 2019). Ditambah intervensi Barat di Kosovo, Irak, dan Libya, Rusia semakin menilai AS dan NATO sebagai kekuatan yang secara aktif mengganggu wilayah pengaruhnya (Lipman, 2015).

Di Era Putin, Rusia memandang Barat dan NATO sebagai kekuatan historis yang selalu berupaya menekan dan mengancam ruang strategisnya. Ekspansi NATO ke Eropa Timur dianggap juga sebagai simbol paling jelas dari ancaman tersebut, sehingga setiap langkah Barat mendekati ke wilayah perbatasannya dinilai oleh Rusia sebagai provokasi langsung terhadap stabilitas strategisnya (Gotz, 2019). Intervensi politik dan militer Rusia di Georgia maupun Ukraina ketika terjadi 'Revolusi Berwarna', dipahami oleh Moskow sebagai tindakan defensif yang muncul dari persepsi citra bahwa Barat secara sistematis berusaha menggerus posisi Rusia dalam tatanan internasional (Gotz, 2019). Rusia memandang keterlibatan Barat dalam mendukung demokrasi di Eropa Timur dan "revolusi warna" sebagai campur tangan yang bertujuan untuk merusak pengaruh dan keamanan negaranya. Kremlin menganggap upaya ini sebagai bentuk perang non-militer atau kudeta yang diatur dari luar dan dirancang untuk mengacaukan pemerintah yang sah dan berdaulat dan memperluas pengaruh Barat (terutama

NATO dan UE) ke dalam wilayah pengaruh historis Rusia (Aubin, 2024). Rusia melihat strategi Barat tersebut sebagai ancaman langsung terhadap stabilitas regional dan legitimasi kekuasaannya, sehingga kebijakan Rusia terhadap tetangganya semakin defensif dan konfrontatif. Sebagai mana pendapat Maria Lipman bahwa antisipasi Rusia terhadap Amerika Serikat dan NATO lahir dari kombinasi kekecewaan historis, pengalaman politik pasca-Soviet, serta konstruksi identitas nasional yang dibentuk oleh negara (Lipman, 2015).

Menyusul invasi Rusia di Ukraina Februari 2022, Rusia memandang bantuan Barat ke Ukraina sebagai tindakan agresif dan merupakan perang proksi oleh NATO dan AS untuk melemahkan Rusia. Rusia juga membingkai dirinya sebagai korban ekspansi Barat dan berusaha untuk menahan kekuatan Barat melalui konflik berkepanjangan dan taktik perang hibrida. Narasi Rusia menggambarkan dukungan Barat terhadap Ukraina sebagai memicu konflik yang tidak adil, menghambat resolusi cepat, dan bertujuan untuk memecah belah Rusia (Liik, 2024). Bantuan Barat ke Ukraina karenanya dipersepsikan sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasional Rusia dan sebagai bentuk konfrontasi geopolitik, bukan sebagai solidaritas internasional.

Dengan demikian secara keseluruhan, Rusia mencitrakan Amerika Serikat dan Barat sebagai ancaman historis, hegemonik, dan eksistensial yang berusaha menekan ruang strategisnya. Citra ini lahir dari pengalaman panjang sejak Perang Dingin, ekspansi NATO ke timur, intervensi Barat di wilayah bekas Soviet, hingga dukungan militer terhadap Ukraina. Bagi Moskow, tindakan Barat bukan sekadar kebijakan geopolitik, tetapi bentuk upaya sistematis untuk melemahkan Rusia, mengekang pengaruhnya, dan mencampuri ruang keamanan kawasan. Dengan demikian, dalam narasi strategis Rusia, Barat diposisikan bukan sebagai mitra sejajar, melainkan lawan strategis yang harus diwaspadai dan diimbangi.

Citra Barat sebagai musuh eksistensial ini ini mempengaruhi persepsi adanya ancaman yang terus-menerus dari Barat sehingga mendorong Rusia melihat nuklir sebagai alat penjamin stabilitas strategis (Syafira, 2024). Dalam pidatonya pada Juli 2024 Dmitry Peskov, juru bicara Kremlin, menegaskan bahwa sikap Amerika Serikat, Uni Eropa dan NATO yang terus memberikan bantuan militer

kepada Ukraina menunjukkan sikap bermusuhan terhadap Rusia, dan hal ini perlu direspons dengan penangkal yang kuat melalui kapasitas nuklir negara tersebut. Dari pandangan Peskov ini jelas menunjukkan bahwa citra Barat sebagai ancaman menjadi salah satu alasan yang mendorong perubahan doktrin nuklir Rusia. Pernyataan juru bicara Kremlin tersebut menunjukkan bahwa citra Barat sebagai ancaman telah mendorong Rusia merumuskan kebijakan luar negeri dan keamanan yang bersifat defensif dan responsif, termasuk penyesuaian doktrin nuklir pada tahun 2024.

B. Faktor Persepsi Niat Barat dan NATO dalam Revisi Doktrin Nuklir Rusia 2024

Niat (*intentions*) adalah tujuan atau maksud suatu aktor negara, namun sulit diketahui secara pasti sehingga sering ditafsirkan melalui perilaku dan persepsi, meskipun hal itu sering kali bukan realitas yang sebenarnya (Jervis, 1976). Jervis berpendapat bahwa dalam sistem internasional yang anarkis, negara-negara menghadapi ketidakpastian mendasar mengenai niat negara lain. Sebuah negara mungkin termotivasi oleh keinginan untuk keamanan (niat defensif), namun tindakannya (misalnya, pembangunan militer) dapat disalahartikan oleh negara lain sebagai niat agresif atau ekspansionis. Dalam dimensi teorinya yaitu *underestimation dan overestimation of intentions*, menyebutkan bahwa aktor sering keliru dalam memperkirakan niat negara lain (Jervis, 1976).

Secara umum, Rusia melihat Barat sebagai kekuatan ofensif karena pengalaman historis pasca-Perang Dingin. Presiden Putin berpendapat bahwa Barat, khususnya Amerika Serikat dan NATO, memiliki niat ofensif dan bertekad melemahkan Rusia dan terus berusaha mencampuri urusan internalnya (Reuters, 2024). Persepsi ini semakin menguat di era Putin, ketika gerakan pro-demokrasi seperti “Revolusi Berwarna” dipandang sebagai upaya campur tangan Barat untuk melemahkan stabilitas internal Rusia. Akibatnya, berbagai tindakan Barat baik politik, militer, maupun diplomatik diinterpretasikan sebagai strategi yang bertujuan menekan dan mengancam Rusia.

Rusia menggambarkan Revolusi Berwarna di ruang pasca-Soviet bukan sebagai gerakan domestik spontan, melainkan sebagai bagian dari “peperangan hibrida” yang dirancang oleh Barat (Osflaten, 2025). Persepsi ancaman ini muncul dari pendekatan strategi yang khas yang melibatkan pemantauan dan peramalan situasi internasional untuk mengidentifikasi tren dan skenario yang mungkin menyebabkan ancaman di masa depan terhadap keamanan nasional Federasi Rusia (Osflaten, 2025). Karena hal itu juga setiap tindakan Barat (mulai dari ekspansi militer, diplomasi, bantuan demokrasi, hingga kegiatan soft power) didekati dengan prasangka bahwa itu adalah bagian dari ancaman. Dalam konteks ini Rusia memandang bahwa Barat tidak sekadar pesaing, tetapi musuh strategis yang agresif, yang mengancam keamanan nasional Rusia (Hjermann & Wilhelmsen, 2025).

Selain itu, keputusan NATO untuk memperluas keanggotaan ke negara-negara bekas Blok Timur oleh Rusia ditafsirkan sebagai suatu bentuk ekspansi ini bukan sekadar penyesuaian institusional atau defensif, dengan niatan dan upaya strategis Barat untuk mengepung Rusia (Najmi, 2024). Keputusan ekspansi timur NATO ini juga membuat persepsi di Moskow kepada NATO berubah perlahan dari yang sebelumnya ‘kemungkinan untuk mitra’ menjadi ancaman militer yang nyata (Tsygankov, 2018).

Sebelum konflik Rusia Ukraina berubah menjadi perang, pada Januari 2022 Sergey Lavrov melihat niat Barat melalui NATO sebagai ancaman langsung dan ofensif yang bertekad untuk melemahkan Rusia (VOA, 2022). Lavrov secara tegas mengklaim bahwa NATO ingin menarik Ukraina ke dalam aliansi tersebut, sebuah tindakan yang ia anggap bukan sebagai langkah pertahanan, melainkan sebagai pelanggaran mencolok terhadap komitmen sebelumnya (VOA, 2022).

Ketika perang Rusia Ukraina meletus, Rusia memandang Barat semakin ofensif yang secara spesifik ditunjukkan melalui usulan pengiriman pasukan darat oleh anggota NATO untuk berperang di Ukraina (Reuters, 2024). Rusia menyatakan akan mengubah doktrin nuklirnya sebagai respons langsung terhadap apa yang mereka sebut sebagai "tindakan agresif dan berbahaya" dari Barat,

khususnya terkait dengan dukungan militer terhadap Ukraina. Putin menegaskan bahwa langkah ini adalah bentuk eskalasi yang sangat berbahaya, yang menurutnya dapat menyebabkan konflik langsung dengan penggunaan senjata nuklir dan ancaman penghancuran peradaban, menggambarkan betapa dalamnya krisis dan ketidakpercayaan antara Rusia dan Barat saat ini (Reuters, 2024).

Namun demikian, beberapa ahli memandang bahwa anggapan Rusia bahwa *niat* Barat bersifat ofensif terutama lahir dari salah persepsi, tetapi kemudian dimanfaatkan sebagai legitimasi untuk memperkuat dan menyesuaikan doktrin nuklir (Kacprzyk, 2024). Tsygankov juga berpendapat bahwa kekhawatiran Rusia terhadap Barat tidak semata berasal dari ancaman militer yang nyata, tetapi lebih banyak dibentuk oleh konstruksi persepsi di lingkaran elite politiknya (Tsygankov, 2018). Oleh karenanya, pandangan bahwa NATO dan Barat merupakan musuh telah menjadi semacam *common sense* dalam struktur kepemimpinan Rusia. Ketidakmampuan untuk membedakan antara tindakan defensif dan ofensif membuat Moskow memaknai hampir setiap kebijakan Barat sebagai ancaman langsung terhadap keamanan dan pengaruh regionalnya (Tsygankov, 2018). Dengan demikian, anggapan Rusia bahwa Barat bersikap ofensif sebenarnya banyak dipengaruhi oleh salah persepsi yang sudah terbentuk sejak lama. Ekspansi NATO, revolusi warna, dan dukungan Barat terhadap Ukraina ditafsirkan sebagai ancaman langsung, sehingga setiap langkah Barat dianggap bagian dari upaya melemahkan Rusia. Cara ini kemudian dimanfaatkan oleh para pemimpin Rusia untuk membenarkan kebijakan yang lebih keras, termasuk keputusan untuk menyesuaikan doktrin nuklir.

Berkaitan dengan perubahan doktrin nuklir, sebelumnya pada tahun 2020 Rusia melakukan perubahan doktrin dikarenakan oleh faktor kekhawatiran Rusia dalam melihat niat Barat terkait penarikan AS dari INF (*Intermediate-Range Nuclear Forces*) Treaty 2019. Pada Agustus 2019, AS menyatakan keluar dari kesepakatan INF, karena AS telah enam bulan sebelumnya memberi peringatan kepada Rusia yang dianggap tidak mematuhi kesepakatan INF dengan mengembangkan senjata SSC-8 (NATO, 2019). Perkembangan ini dipersepsikan

oleh Rusia sebagai indikasi niat Barat yang semakin ofensif, karena berpotensi memperpendek waktu peringatan dini dan meningkatkan kerentanan sistem pertahanan strategis Rusia. Kekhawatiran tersebut memperkuat pandangan Moskow bahwa arsitektur keamanan Eropa sedang berubah secara merugikan, dan turut mendorong Rusia untuk menegaskan kembali peran senjata nuklir melalui perubahan doktrin nuklirnya pada 2020 (NATO, 2019). Pada Oktober 2020, Putin mengecam penarikan Amerika Serikat dari INF Treaty dan menyatakan bahwa keputusan sepihak itu memperbesar risiko perlombaan senjata dan memperburuk konfrontasi antara Rusia dan NATO (Xinhua, 2020). Putin menilai bahwa keluarnya AS dari perjanjian tersebut meningkatkan ketidakpastian strategis di Eropa, merusak kepercayaan, dan membuka peluang bagi penempatan sistem senjata yang sebelumnya dilarang, sesuatu yang dipandang Moskow sebagai perilaku Barat yang tidak memperhatikan keamanan Rusia (Xinhua, 2020). Kondisi ini memunculkan kekhawatiran Rusia bahwa Barat bersedia mengambil risiko eskalasi dan mengabaikan keamanan Rusia, sehingga meningkatkan rasa tidak aman terhadap potensi serangan mendadak.

Pola yang terlihat pada perubahan doktrin nuklir Rusia tahun 2020 terulang pada 2024, ketika kembali terjadi peningkatan ketegangan dan langkah-langkah Barat dipersepsikan Rusia sebagai ancaman langsung, sehingga salah persepsi tersebut kembali dimanfaatkan untuk membenarkan perubahan doktrin nuklir Rusia. Perkembangan nyata yang menunjukkan bahwa Amerika Serikat sedang mempertimbangkan untuk memberikan rudal jelajah jarak jauh *Tomahawk* kepada Ukraina, yang dipersepsikan Rusia sebagai potensi ancaman serius karena kemampuan senjata ini untuk mencapai target dari jauh ke dalam wilayah Rusia (Vakulina, 2025). Walaupun belum ada keputusan final resmi bahwa AS benar-benar akan mengirim rudal *Tomahawk* ke Ukraina, pembicaraan dan pertimbangan serius terhadap kemungkinan tersebut sedang berlangsung pada 2025 (Vakulina, 2025).

Secara keseluruhan, anggapan Rusia bahwa Barat bersifat ofensif terbentuk dari pengalaman historis pasca-Perang Dingin dan menguat dalam persepsi elite

politik Rusia. Ekspansi NATO, revolusi warna, serta dukungan Barat terhadap Ukraina ditafsirkan sebagai upaya sistematis untuk melemahkan Rusia, sehingga hampir setiap kebijakan Barat dipandang sebagai ancaman langsung. Contoh perubahan doktrin nuklir Rusia pada 2020 yang dipicu oleh kekhawatiran atas penarikan AS dari *INF Treaty* menunjukkan bagaimana persepsi tersebut dimanfaatkan sebagai legitimasi untuk memperkuat peran senjata nuklir. Pola ini terulang pada 2024, ketika meningkatnya ketegangan kembali mendorong Rusia menafsirkan langkah Barat sebagai ancaman ofensif dan membenarkan penyesuaian doktrin nuklirnya.

C. Faktor Persepsi Tekanan dari Barat dan NATO dalam Pengambilan Keputusan Revisi Doktrin Nuklir Rusia 2024

Dalam situasi krisis, pengambilan keputusan nuklir berlangsung di bawah tekanan tinggi (konflik) dan ketidakpastian yang ekstrem. Menurut Jervis, kondisi semacam ini membatasi kemampuan kognitif para pengambil keputusan, sehingga mereka cenderung menyederhanakan situasi yang kompleks dan mengandalkan persepsi serta asumsi yang telah terbentuk sebelumnya (Jervis, 1976). Akibatnya, niat dan tindakan pihak lain lebih mudah disalah artikan sebagai ancaman serius.

Penyesuaian doktrin nuklir Rusia berkaitan erat dengan perubahan lingkungan keamanan dan dinamika konflik internasional. lingkungan keamanan Rusia dipersepsikan semakin tidak stabil dan sarat dengan ancaman yang bersifat multidimensional, khususnya akibat meningkatnya konflik bersenjata konvensional dan keterlibatan tidak langsung kekuatan Barat (Alberque, 2024). Rusia memandang bahwa superioritas konvensional NATO, perluasan aliansi ke Eropa Timur, serta dukungan militer Barat dalam konflik regional terutama perang di Ukraina dapat berkembang menjadi ancaman eksistensial meskipun tidak berbentuk serangan nuklir langsung (Alberque, 2024). Selain itu, ketidakimbangan kekuatan konvensional antara Rusia dan negara-negara Barat, terutama NATO juga menjadi faktor penting yang membentuk persepsi lingkungan keamanan Rusia dan strateginya, di mana Rusia sering merasa inferior secara konvensional setelah berakhirnya Perang Dingin dan terutama dalam menghadapi superioritas militer

gabungan Barat (Ven Bruusgaard, 2020). kondisi ini mendorong Rusia untuk menggabungkan kekuatan nuklir dan non-nuklir dalam postur pertahanan strategisnya dan mempertimbangkan penggunaan ancaman nuklir sebagai alat kompensasi terhadap kelemahan dalam kemampuan konvensional, sekaligus mencoba memperluas fleksibilitas dalam pengelolaan eskalasi konflik regional yang dapat berkembang dari perang konvensional menjadi ancaman strategis yang lebih besar (Ven Bruusgaard, 2020).

Lingkungan keamanan Rusia saat ini ditandai oleh narasi konfrontatif dari elitnya yang terintegrasi antara strategi militer dan politik negara. Konflik bersenjata konvensional seperti perang di Ukraina dipahami oleh para pemikir militer dan pembuat kebijakan sebagai bagian dari perjuangan yang lebih luas melawan dominasi Barat, khususnya NATO dan Amerika Serikat, sehingga memperkuat legitimasi pendekatan keamanan yang agresif dan pencegahan eskalasi melalui kekuatan militer (Pavel, 2025). Pandangan tersebut ditegaskan langsung oleh Presiden Vladimir Putin, yang menyatakan bahwa perang di Ukraina bukan sekadar konflik regional, melainkan bagian dari perjuangan yang lebih luas melawan dominasi Barat, khususnya Amerika Serikat dan NATO, yang menurutnya berupaya mempertahankan hegemoni global dan melemahkan Rusia (Haryanto & Raditya, 2022). Narasi ini memperkuat pemahaman bahwa konflik bersenjata konvensional dipersepsikan Rusia sebagai manifestasi persaingan strategis jangka panjang, sehingga integrasi antara strategi militer dan tujuan politik negara menjadi semakin menonjol dalam lingkungan keamanan Rusia saat ini (Haryanto & Raditya, 2022).

Penyesuaian yang dilakukan Rusia tidak semata hanya sebagai bentuk tindakan ofensif Rusia terhadap barat. Perubahan doktrin nuklir Rusia dipresentasikan sebagai respons langsung terhadap narasi dan tindakan Barat yang dianggap terus meningkatkan eskalasi konflik, khususnya melalui dukungan militer kepada Ukraina dan wacana penggunaan senjata Barat untuk menyerang wilayah Rusia (Oleg Burunov, 2024). Barat digambarkan oleh Rusia sebagai pihak yang mendorong konflik konvensional menuju tingkat ancaman strategis, sehingga Rusia

menilai perlu menyesuaikan doktrin nuklirnya untuk mengimbangi tekanan tersebut (Oleg Burunov, 2024). Dengan demikian, langkah Rusia ini dibingkai bukan sebagai inisiatif agresif semata, melainkan sebagai reaksi defensif terhadap narasi Barat yang memosisikan Rusia dalam lingkungan keamanan yang semakin bermusuhan dan berisiko tinggi. Pernyataan itu mendapat penegasan tambahan dari Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, Sergei Shoigu, yang memperingatkan bahwa aktivitas militer NATO membuat meningkatnya ketegangan geopolitik telah meningkatkan risiko bentrokan bersenjata antara kekuatan nuklir, dan mencatat bahwa perubahan doktrin nuklir termasuk perluasan dasar respons nuklir dilakukan sebagai bagian dari upaya Rusia untuk menghadapi apa yang digambarkan sebagai ancaman dari barat (Reuters, 2025).

Perubahan doktrin nuklir Rusia 2024, dengan demikian merupakan hasil dari persepsi lingkungan keamanan yang semakin tidak stabil dan konfrontatif, terutama akibat meningkatnya konflik konvensional serta keterlibatan dan dominasi militer Barat yang dipandang mengancam kepentingan strategis Rusia (Nikolsky, 2024). Superioritas konvensional NATO, perluasan aliansi, dan dukungan militer Barat dalam konflik Ukraina dipersepsikan Rusia sebagai potensi ancaman eksistensial, meskipun tidak berbentuk serangan nuklir langsung (Eken et al., n.d.). Kondisi ketimpangan kekuatan konvensional tersebut mendorong Rusia mengintegrasikan kapabilitas nuklir dan non-nuklir dalam strategi pertahanannya, serta menggunakan ancaman nuklir sebagai alat kompensasi dan pengelolaan eskalasi. Dalam kerangka ini, perubahan doktrin nuklir Rusia tidak semata mencerminkan sikap ofensif, melainkan dibingkai sebagai respons defensif terhadap narasi dan tindakan Barat yang dianggap meningkatkan eskalasi dan risiko konflik strategis, sekaligus mencerminkan pandangan Rusia bahwa konflik konvensional saat ini merupakan bagian dari persaingan geopolitik jangka panjang dengan Barat (Hancock, 2024).

Pola penyesuaian doktrin nuklir Rusia tersebut bukanlah fenomena baru, melainkan memiliki akar historis yang kuat. Secara historis, Pada masa Perang Dingin, meskipun Uni Soviet secara resmi menyatakan komitmen *no first use*,

postur nuklirnya tetap disusun untuk menghadapi konfrontasi strategis yang intens dengan NATO, mencerminkan kondisi persaingan dan ketegangan yang terus-menerus (Panda, 2018). Setelah runtuhnya Uni Soviet, krisis internal serta melemahnya kapabilitas militer konvensional Rusia pada awal 1990-an menciptakan ketidakpastian keamanan yang ekstrem. Dalam konteks tersebut, pencabutan kebijakan *no first use* melalui doktrin militer 1993 merefleksikan upaya pengambil keputusan Rusia untuk mengelola risiko strategis di tengah ketidakseimbangan kekuatan dan perubahan drastis lingkungan keamanan pasca-Perang Dingin (Panda, 2018). Pola serupa kembali terlihat pada doktrin nuklir tahun 2000, yang dirumuskan ketika Rusia berada di bawah tekanan konflik internal di Chechnya dan kekhawatiran terhadap dominasi militer NATO, khususnya setelah intervensi di Kosovo pada 1999 (Sokov, 1999). Dalam kondisi keterbatasan kemampuan konvensional dan ketidakpastian mengenai niat Barat, Rusia memperluas skenario penggunaan senjata nuklir sebagai bentuk pengelolaan risiko dalam situasi krisis. Tekanan konflik dan pengalaman eskalasi Barat tersebut membentuk konteks pengambilan keputusan nuklir yang sangat dipengaruhi oleh persepsi ancaman dan kebutuhan akan pencegah strategis (Sokov, 1999).

Tekanan serupa juga mewarnai perubahan doktrin nuklir 2014 dan 2020, yang disusun di tengah konflik Krimea dan perang Ukraina yang merujuk pada meningkatnya keterlibatan Barat. Doktrin 2014 lahir dalam lingkungan militer politik yang dipersepsikan semakin tidak stabil, sehingga senjata nuklir kembali ditegaskan sebagai pilar utama pencegahan dalam menghadapi ketidakpastian strategis (Tesnova, 2024). Perubahan ini juga dipahami sebagai respons langsung terhadap krisis Ukraina dan aneksasi Krimea, di mana dokumen tersebut disahkan hanya beberapa bulan setelah peristiwa Krimea dan secara eksplisit mencerminkan persepsi Rusia terhadap meningkatnya ancaman eksternal akibat konfrontasi dengan NATO dan Barat pasca 2014 (Mcdermott, 2015). Begitu pula doktrin 2020, yang diperbarui ketika perang Ukraina dan dukungan militer Barat dipahami Rusia sebagai bentuk agresi konvensional yang berpotensi mengancam

kedaulatan negara, sehingga memperluas kondisi penggunaan nuklir sebagai respons terhadap eskalasi krisis (Euronews, 2024).

Dalam konteks revisi doktrin nuklir 2024, tekanan konflik dan ketidakpastian strategis semakin nyata. Rusia secara eksplisit mengaitkan penyesuaian doktrin nuklirnya dengan apa yang dipersepsikan sebagai peran aktif Barat dalam memperdalam krisis perang Ukraina (Anadolu, 2024). Pernyataan Wakil Menteri Luar Negeri Sergei Ryabkov menegaskan bahwa perubahan tersebut merupakan respons terhadap “kursus eskalasi” Barat, menunjukkan bahwa pengambilan keputusan nuklir Rusia berlangsung di bawah tekanan situasi krisis yang berkembang cepat, dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi terhadap niat dan langkah lanjutan pihak lawan (Anadolu, 2024).

Dalam artikel Heather Williams dari *Center for Strategic and International Studies (CSIS)* menjelaskan bahwa perubahan doktrin nuklir Rusia pada 2024 dipicu oleh persepsi Rusia terhadap “intervensi Barat” dalam perang Ukraina, termasuk dukungan militer kepada Kyiv (Williams, 2024). Menurutnya, revisi doktrin ini menunjukkan bahwa pengambil keputusan Rusia bersedia mengambil risiko yang lebih besar dan menyesuaikan ambang penggunaan nuklir sebagai respons terhadap ketidakpastian strategis dan eskalasi konflik yang berlangsung di Ukraina (Williams, 2024).

Begitu juga menurut pakar nuklir Pavel Podvig menyatakan bahwa revisi doktrin nuklir Rusia memperluas skenario di mana senjata nuklir dapat digunakan, dengan ambiguitas yang sengaja diciptakan untuk menghadapi dukungan militer Barat kepada Ukraina dan meningkatkan tekanan strategis terhadap NATO (Hancock, 2024). Menurutnya, Revisi ini mencerminkan bagaimana pengambilan keputusan nuklir Rusia dipengaruhi oleh tekanan krisis yang meningkat akibat konflik yang berkepanjangan dan keterlibatan Barat (Hancock, 2024).

Secara keseluruhan, penyesuaian doktrin nuklir Rusia sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan keamanan yang dipersepsikan semakin tidak stabil, penuh ketidakpastian, dan sarat dengan ancaman multidimensional. Lingkungan

keamanan ini ditandai oleh ketimpangan kekuatan konvensional antara Rusia dan Barat, khususnya superioritas militer NATO, perluasan aliansi ke wilayah Eropa Timur, serta keterlibatan aktif Barat dalam konflik Ukraina yang dipahami Rusia sebagai eskalasi konflik konvensional menuju ancaman strategis. Dalam konteks tersebut, senjata nuklir diposisikan sebagai instrumen utama untuk mengelola risiko, mengompensasi kelemahan konvensional, dan mengendalikan eskalasi konflik di tengah tekanan keamanan yang meningkat. Pola ini menunjukkan kesinambungan historis, di mana sejak masa Perang Dingin hingga periode pasca-Soviet, setiap perubahan doktrin nuklir Rusia selalu beriringan dengan lingkungan keamanan yang memburuk, krisis regional, dan persepsi ancaman eksternal yang meningkat. Revisi doktrin pada tahun 2000, 2014, 2020, hingga 2024 menegaskan bahwa kebijakan nuklir Rusia tidak dapat dilepaskan dari cara Rusia menafsirkan lingkungan keamanannya, yakni sebagai ruang yang konfrontatif, berisiko tinggi, dan didominasi oleh tekanan strategis Barat, sehingga perubahan doktrin tersebut dibingkai sebagai respons defensif terhadap lingkungan keamanan yang terus memburuk.

BAB IV

KESIMPULAN

Penelitian ini berangkat dari pertanyaan mengenai mengapa Rusia merevisi doktrin nuklirnya pada tahun 2024 di tengah berlangsungnya konflik Rusia–Ukraina dan meningkatnya keterlibatan Amerika Serikat serta NATO dalam konflik tersebut. Berdasarkan keseluruhan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa revisi doktrin nuklir Rusia tahun 2024 merupakan hasil interaksi yang kompleks antara perubahan lingkungan keamanan eksternal dan konstruksi persepsi ancaman di tingkat kepemimpinan negara. Revisi tersebut bukanlah kebijakan yang muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan puncak dari evolusi strategis yang telah berlangsung secara bertahap sejak awal era kepemimpinan Vladimir Putin.

Sejak awal 2000-an, Rusia telah menunjukkan kecenderungan untuk menempatkan senjata nuklir sebagai instrumen utama penangkalan dalam menghadapi apa yang dipersepsikan sebagai ketidakseimbangan kekuatan dengan Barat. Doktrin militer dan nuklir tahun 2000 lahir dalam konteks melemahnya kapasitas konvensional Rusia pasca runtuhnya Uni Soviet, sehingga senjata nuklir diposisikan sebagai jaminan utama terhadap ancaman eksternal. Perkembangan doktrin tahun 2014, yang muncul setelah krisis Ukraina dan memburuknya hubungan Rusia dengan Barat, memperlihatkan penegasan kembali ancaman yang dikaitkan secara eksplisit dengan ekspansi NATO dan peningkatan infrastruktur militer Barat di dekat perbatasan Rusia. Doktrin tahun 2020 kemudian memperjelas kondisi penggunaan senjata nuklir dalam situasi yang dianggap mengancam eksistensi negara, menunjukkan bahwa konsep deterrence Rusia semakin terfokus pada skenario eskalasi yang melibatkan kekuatan besar.

Eskalasi konflik Rusia–Ukraina sejak 2022 menjadi titik balik penting dalam transformasi lingkungan keamanan tersebut. Dukungan militer dan intelijen

dari Amerika Serikat serta NATO kepada Ukraina mengalami peningkatan bertahap, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Penyediaan sistem persenjataan canggih, termasuk kemampuan serangan jarak jauh dan presisi tinggi, serta dukungan diplomatik yang konsisten terhadap Ukraina, dipersepsikan oleh Moskow sebagai bentuk keterlibatan strategis yang melampaui sekadar dukungan defensif. Dalam persepsi Rusia, konflik tersebut tidak lagi semata-mata bersifat regional, tetapi telah berkembang menjadi konfrontasi tidak langsung dengan negara-negara Barat yang memiliki kemampuan nuklir. Perubahan persepsi ini mempersempit ruang kompromi dan meningkatkan sensitivitas terhadap ancaman yang dianggap dapat menyentuh stabilitas serta kedaulatan negara.

Penelitian ini menunjukkan bahwa revisi doktrin nuklir tahun 2024 harus dipahami dalam kerangka tersebut. Secara formal, revisi tersebut mungkin tampak sebagai perubahan yang mendadak, namun secara substantif ia merupakan akumulasi dari dinamika keamanan yang telah menguat selama satu dekade terakhir dan mencapai intensitas tertinggi pasca-2022. Lingkungan keamanan yang semakin konfrontatif, ditambah dengan meningkatnya ketegangan retorika dan praktik militer di lapangan, membentuk kondisi yang mendorong penyesuaian ambang dan formulasi penggunaan senjata nuklir Rusia. Dengan demikian, revisi doktrin 2024 merupakan respons strategis terhadap transformasi lingkungan keamanan yang dipersepsikan semakin berisiko dan eskalatif.

Dimensi persepsi memainkan peran sentral dalam keseluruhan proses tersebut. Dalam sistem politik Rusia yang sangat terpusat, Presiden memiliki otoritas dominan dalam penentuan kebijakan keamanan nasional, termasuk kebijakan nuklir, sementara Kementerian Pertahanan bertanggung jawab dalam merumuskan implementasi operasionalnya. Oleh karena itu, bagaimana ancaman ditafsirkan oleh kepemimpinan menjadi faktor penentu dalam perubahan doktrin. Tindakan Barat yang dimaksudkan sebagai upaya memperkuat pertahanan Ukraina dapat dipersepsikan sebagai langkah ofensif atau sebagai bentuk pengepungan strategis terhadap Rusia. Perbedaan interpretasi ini menciptakan dilema keamanan

yang semakin tajam, di mana setiap peningkatan dukungan dianggap sebagai eskalasi yang memerlukan respons penyeimbang.

Dari keseluruhan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa doktrin nuklir Rusia bersifat adaptif dan kontekstual. Ia bukan dokumen statis yang semata-mata mencerminkan kemampuan militer, tetapi juga merupakan instrumen politik yang menyampaikan pesan strategis kepada pihak lawan dan komunitas internasional. Revisi tahun 2024 tidak hanya bertujuan untuk mengatur ulang parameter internal kebijakan pertahanan, tetapi juga untuk mengirimkan sinyal bahwa Rusia siap menyesuaikan ambang nuklirnya dalam menghadapi tekanan eksternal yang dianggap mengancam eksistensi negara. Dengan kata lain, doktrin nuklir berfungsi sekaligus sebagai alat deterrence dan sebagai instrumen komunikasi strategis.

Penelitian ini juga memberikan sejumlah pelajaran penting. Pertama, stabilitas strategis internasional sangat dipengaruhi oleh dinamika persepsi antarnegara. Dalam situasi krisis, kecenderungan untuk menafsirkan tindakan lawan secara negatif dapat memperbesar risiko salah persepsi (*misperception*) dan mendorong spiral eskalasi. Ketika komunikasi strategis melemah dan saluran dialog terbatas, potensi kesalahan interpretasi semakin tinggi, terlebih dalam konteks interaksi antar kekuatan nuklir. Kedua, dukungan militer dalam konflik proksi memiliki implikasi yang melampaui medan perang lokal. Peningkatan bantuan yang dimaksudkan untuk memperkuat deterrence justru dapat memicu respons eskalatif dari pihak yang merasa terancam secara langsung. Ketiga, dalam sistem politik yang terpusat, peran pemimpin dan lingkaran elite menjadi sangat menentukan dalam pembentukan kebijakan strategis, sehingga perubahan doktrin tidak dapat dilepaskan dari dinamika persepsi di tingkat kepemimpinan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa revisi doktrin nuklir Rusia tahun 2024 merupakan refleksi dari interaksi antara tekanan eksternal dan konstruksi ancaman di tingkat domestik. Transformasi lingkungan keamanan yang semakin konfrontatif, ditambah dengan persepsi kepemimpinan terhadap keterlibatan Barat sebagai ancaman eksistensial, membentuk landasan bagi

perubahan kebijakan tersebut. Dalam sistem internasional yang semakin terpolarisasi, kemampuan negara-negara besar untuk mengelola persepsi, menjaga komunikasi strategis, dan membangun mekanisme pengurangan risiko menjadi faktor kunci dalam mencegah eskalasi yang tidak terkendali. Tanpa upaya untuk meredam ketidakpercayaan dan mengurangi salah tafsir, perubahan doktrin strategis seperti yang terjadi pada Rusia berpotensi memperdalam ketidakstabilan global dan meningkatkan risiko konfrontasi antar kekuatan besar di masa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adamsky, D. (2015). *Cross-domain coercion: The current Russian art of strategy*. Institut Français des Relations Internationales (Ifri).
https://www.ifri.org/sites/default/files/migrated_files/documents/atoms/files/pp54_adamsky.pdf
- Al-Arabiya English. (2024). Ukraine foreign minister calls Russian nuclear weapons “saber-rattling”. <https://english.alarabiya.net/News/world/2024/11/20/ukraine-foreign-minister-calls-russian-nuclear-saber-rattling->
- Allison, R. (2025). Averting acute escalation in Russia’s war against Ukraine. *International Affairs*, 101(5), 1769–1791. <https://doi.org/10.1093/ia/iaaf137>
- Anadolu. (2024). Russia to change its nuclear doctrine due to West’s actions amid Ukraine war. ANews. <https://www.anews.com.tr/world/2024/09/01/russia-to-change-its-nuclear-doctrine-due-to-west-s-actions-amid-ukraine-war>
- Anand, A. (2025). Russia’s Sergey Lavrov slams West, says “should’ve never trusted” them, pins hopes on SCO, BRICS amid Trump’s sanctions. *Mint*.
<https://www.livemint.com/news/world/russias-sergey-lavrov-slams-west-says-shouldve-never-trusted-them-pins-hopes-on-sco-brics-amid-trumps-sanctions/amp-11761195435084.html>
- Arms Control Association. (2024). Russia revises nuclear use doctrine.
<https://www.armscontrol.org/act/2024-12/news/russia-revises-nuclear-use-doctrine>
- Aubin, L. (2024). Russia in the post-Soviet space: What strategies of influence? IRIS.
<https://www.iris-france.org/en/russia-in-the-post-soviet-space-what-strategies-of-influence/>
- Bleek, P. C. (2000). Putin signs new military doctrine, fleshing out security concept. *Arms Control Today*. <https://www.armscontrol.org/act/2000-05/news/putin-signs-new-military-doctrine-fleshing-out-security-concept>
- Blank, S. J. (Ed.). (2011a). *Russian military politics and Russia’s 2010 defense doctrine*. Strategic Studies Institute, U.S. Army War College.
- Blank, S. J. (Ed.). (2011b). *Russian nuclear weapons: Past, present, and future*. Strategic Studies Institute, U.S. Army War College.
- Charnysh, V. (2010). Russia’s military doctrine. *Arms Control Today*.
<https://www.armscontrol.org/act/2010-03/russian-nuclear-threshold-not-lowered>
- Daehnhardt, P. (2022). The euro-Atlantic security order and the war in Ukraine. *Relações Internacionais*. <https://doi.org/10.23906/ri2022.sia02>
- Frederick, B., Charap, S., Boston, S., et al. (2022). *Pathways to Russian escalation against NATO from the Ukraine war*. <https://doi.org/10.7249/pea1971-1>

- Gavin, F. J. (2022). Remembering Robert Jervis. *Texas National Security Review*.
<https://tnsr.org/roundtable/remembering-robert-jervis/>
- Götz, E. (2019). Explaining Russia's opposition to NATO enlargement. *Transatlantic Relations*. <https://transatlanticrelations.org/wp-content/uploads/2019/04/21-Gotz.pdf>
- Hancock, C. (2024). Russia's new nuclear doctrine takes advantage of ambiguity. *The Moscow Times*. <https://www.themoscowtimes.com/2024/11/19/russias-new-nuclear-doctrine-takes-advantage-of-ambiguity-a87072>
- Hjermann, A. R., & Wilhelmsen, J. (2025). Topos ancaman dan metapolitik dalam sekuritisasi NATO oleh Rusia pasca-Krimea. *Review of International Studies*, 51(4), 649–668. <https://doi.org/10.1017/S0260210524000937>
- Jervis, R. (1976). *Perception and misperception in international politics*. Princeton University Press.
- Jönsson, C. (1984). *Superpower: Comparing American and Soviet foreign policy*. Frances Pinter.
- Kacprzyk, A. (2024). Russia changes its nuclear doctrine. PISM.
<https://www.pism.pl/publications/russia-changes-its-nuclear-doctrine>
- Kahn, H. (1960). *The nature and feasibility of war and deterrence*. RAND Corporation.
- Kipp, J. W. (2011). Russian military doctrine: Past, present, and future. In S. J. Blank (Ed.), *Russian military politics and Russia's 2010 defense doctrine* (pp. 63–152). Strategic Studies Institute, U.S. Army War College.
- Liik, K. (2024). Farce then tragedy: Russian views of the West and what they mean for Ukraine. ECFR. <https://ecfr.eu/publication/farce-then-tragedy-russian-views-of-the-west-and-what-they-mean-for-ukraine/>
- Lipman, M. (2015). How Russia has come to loathe the West. ECFR.
https://ecfr.eu/article/commentary_how_russia_has_come_to_loathe_the_west311346
- Lóránt, S. (2025). Doctrine by necessity. *Hadtudományi Szemle*, 18(1), 103–120.
<https://doi.org/10.32563/hsz.2025.1.8>
- Maulidina, S. (2023). Analysis of US-NATO entanglement in Russo-Ukrainian conflict: “Western axis” an effort to contain China in Europe. *Journal of Terrorism Studies*, 5(1). <https://doi.org/10.7454/jts.v5i1.1059>
- McDermott, R. (2015). Putin signs new military doctrine: Core elements unchanged. Jamestown Foundation.
- Mendelson, S. E., & Gerber, T. P. (2008). Us and them: Anti-American views of the Putin generation. *Washington Quarterly*, 31(2), 131–150.

- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- NATO. (2019). Statement on Russia's failure to comply with the Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty. <https://www.nato.int>
- Osflaten, A. (2025). Russian forecasting and pre-emption: The prelude to the invasion of Ukraine. *Scandinavian Journal of Military Studies*, 8(1), 57–73. <https://doi.org/10.31374/sjms.361>
- Panda, A. (2018). "No first use" and nuclear weapons. Council on Foreign Relations.
- Petersson, B. (2001). *National self-images and regional identities in Russia*. Ashgate.
- Pilkington, P. (2022). How Russia views America. *American Affairs Journal*.
- Pifer, S. (2024). How credible is Russia's evolving nuclear doctrine? Stanford University.
- Podvig, P. (2014). New version of the military doctrine. Russian Strategic Nuclear Forces.
- Popov, H. V. (2025). The misperception theory by Robert Jervis: Lessons for analyzing contemporary geopolitical crises. *Актуальні проблеми філософії та соціології*, 52, 250–256. <https://doi.org/10.32782/apfs.v052.2024.40>
- Putin, V. (2014). *Military doctrine of the Russian Federation*.
- Reif, K. (2018). Nuclear policy of the Russian Federation. CNAS.
- Saradzhyan, S. (2024). New principles of Russia's nuclear deterrence liberalize conditions for use, unsurprisingly. Belfer Center.
- Schneider, M. B. (2022). Threats of war and nuclear war: Putin's effort to revive the Soviet Union. *RealClearDefense*.
- Shevtsova, L. (2003). *Putin's Russia*. Carnegie Endowment for International Peace.
- Sinovets, P., & Renz, B. (2015). Russia's 2014 military doctrine and beyond: Threat perceptions, capabilities and ambitions. NATO Defense College.
- Snyder, J. L. (1977). *The Soviet strategic culture: Implications for limited nuclear operations*. RAND Corporation.
- Sokov, N. (1999). Russia's 2000 military doctrine. Nuclear Threat Initiative.
- Sokov, N. (2020). Russia clarifies its nuclear deterrence policy. Vienna Center for Disarmament and Non-Proliferation.
- Topychkanov, P. (2020). Russia's nuclear doctrine moves the focus from non-Western threats. SIPRI.

- Trenin, D. (2007). Russia redefines itself and its relations with the West. *Washington Quarterly*, 30(2), 95–105.
- Tsygankov, A. P. (2018). The sources of Russia's fear of NATO. *Communist and Post-Communist Studies*, 51(2), 101–111.
<https://doi.org/10.1016/j.postcomstud.2018.04.002>
- Williams, H. (2024). Why Russia is changing its nuclear doctrine now. CSIS.
- Wolkov, B. M., & Balatsky, G. I. (2012). Changes in Russia's military and nuclear doctrine. <https://doi.org/10.2172/1047125>
- Youngs, R. (2023). Democracia, orden internacional y guerra en Ucrania. *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*. <https://doi.org/10.24241/rcai.2023.134.2.37>



Министерство иностранных дел
Российской Федерации

03.12.2024 17:26

№

Fundamentals of State Policy of the Russian Federation on Nuclear Deterrence

APPROVED
by the Executive Order
of the President of the Russian Federation
No.991 of November 19, 2024

FUNDAMENTALS of State Policy of the Russian Federation on Nuclear Deterrence

I. General Provisions

1. These Fundamentals are a strategic planning document in the area of ensuring defence that reflects official views on the essence of nuclear deterrence, identifies military risks and threats intended to be neutralized by the implementation of nuclear deterrence, as well as defines the principles of nuclear deterrence and the conditions for the transition of the Russian Federation to the employment of nuclear weapons.

2. Assured deterrence of a potential adversary from aggression against the Russian Federation and (or) its allies is one of the highest state priorities. Deterrence of aggression is ensured by the totality of the military might of the Russian Federation, including nuclear weapons.

3. The state policy of the Russian Federation on nuclear deterrence (hereafter referred to as “state policy on nuclear deterrence”) is a set of coordinated political, military, military-technical, diplomatic, economic, information, and other measures, unified by a common concept and implemented with reliance on nuclear deterrence

forces and means to prevent aggression against the Russian Federation and (or) its allies.

4. The state policy on nuclear deterrence is defensive in nature, aimed at maintaining the capabilities of nuclear forces at a level sufficient to ensure nuclear deterrence, and guarantees the protection of sovereignty and territorial integrity of the state, deterrence of a potential adversary from aggression against the Russian Federation and (or) its allies, and – in the event of an outbreak of a military conflict – the prevention of the escalation in hostilities and their cessation on terms acceptable to the Russian Federation and (or) its allies.

5. The Russian Federation considers nuclear weapons as a means of deterrence, the employment of which is an extreme and compelled measure, and makes all the necessary efforts to reduce the nuclear threat and prevent aggravation of interstate relations that could trigger military conflicts, including nuclear ones.

6. The statutory legal basis of these Fundamentals consists of the Constitution of the Russian Federation, generally recognized principles and norms of international law, international treaties of the Russian Federation, federal constitutional laws, federal laws, and other statutory legal acts and documents regulating defence and security matters.

7. The provisions of these Fundamentals are binding on all federal government authorities and other government bodies and organizations involved in ensuring nuclear deterrence.

8. These Fundamentals may be adjusted to account for external and internal factors that shape defence requirements.

II. The Essence of Nuclear Deterrence

9. The Russian Federation exercises nuclear deterrence toward a potential adversary, defined as individual states and military coalitions (blocs, alliances), that consider the Russian Federation as a potential adversary and possess nuclear and (or) other types of weapons of mass destruction or significant combat capabilities of general purpose forces. Nuclear deterrence is also exercised toward states that provide territory, air and (or) sea space under their control, as well as resources for preparing and committing aggression against the Russian Federation.

10. Aggression by any state from a military coalition (bloc, alliance) against the Russian Federation and (or) its allies is considered as the aggression by this

coalition (bloc, alliance) as a whole.

11. Aggression against the Russian Federation and (or) its allies by any non-nuclear state with the participation or support of a nuclear state is considered as their joint attack.

12. Nuclear deterrence is aimed to ensure that a potential adversary realizes the inevitability of retaliation in the event of aggression against the Russian Federation and (or) its allies.

13. Nuclear deterrence is ensured by the presence in the structure of the Armed Forces of the Russian Federation of combat-ready forces and means capable of inflicting assured unacceptable damage on a potential adversary under any circumstances through the employment of nuclear weapons, as well as by the readiness and resolve of the Russian Federation to employ such weapons.

14. Nuclear deterrence is implemented continuously in peacetime, during the period of immediate threat of aggression, and in wartime, up to the beginning of nuclear weapons employment.

15. The main military risks that, depending on changes in the military-political and strategic situation, can evolve into military threats to the Russian Federation (threats of aggression) and that are intended to be neutralized by the implementation of nuclear deterrence are as follows:

a) possession by a potential adversary of nuclear and (or) other types of weapons of mass destruction that can be employed against the Russian Federation and (or) its allies, as well as of delivery means for these types of weapons;

b) possession and deployment by a potential adversary of missile defence systems and assets, intermediate- and shorter-range cruise and ballistic missiles, high-precision non-nuclear and hypersonic weapons, unmanned combat vehicles of various basing modes, directed energy weapons that can be used against the Russian Federation;

c) buildup by a potential adversary on the territories contiguous to the Russian Federation and its allies and in adjacent waters of general purpose forces groupings, which include nuclear weapons delivery means, and (or) military infrastructure ensuring the employment of such means;

d) development and deployment by a potential adversary of missile defence and anti-satellite warfare assets, as well as of strike systems in space;

e) deployment of nuclear weapons and their delivery means on the territories of non-nuclear states;

f) establishment of new or expansion of existing military coalitions (blocs, alliances), leading to the advancement of their military infrastructure to the borders of the Russian Federation;

g) actions by a potential adversary aimed at isolating a part of the territory of the Russian Federation, including blocking access to vital transport communications;

h) actions by a potential adversary aimed at defeating (destroying, eliminating) environmentally hazardous facilities of the Russian Federation that may lead to technogenic, ecological or social disasters;

i) planning and conduct of large-scale military exercises by a potential adversary near the borders of the Russian Federation;

j) uncontrolled proliferation of weapons of mass destruction, their means of delivery, technologies and equipment for their manufacture.

16. The principles of nuclear deterrence are as follows:

a) continuity of activities ensuring nuclear deterrence;

b) adaptability of nuclear deterrence to military risks and threats;

c) uncertainty for a potential adversary in terms of scale, time, and place of the possible employment of nuclear deterrence forces and means;

d) centralization of state governance over the activities of federal executive authorities and organizations involved in ensuring nuclear deterrence;

e) rationality of the structure and composition of nuclear deterrence forces and means, as well as their maintenance at a level sufficient to fulfil the assigned tasks;

f) maintaining constant readiness of a designated part of nuclear deterrence forces and means for combat employment;

g) centralization of the command over the employment of nuclear weapons, including those located outside the territory of the Russian Federation.

17. The nuclear deterrence forces of the Russian Federation include land-, sea- and air-based nuclear forces.

III. Conditions for the Transition of the Russian Federation to the Employment of Nuclear Weapons

18. The Russian Federation reserves the right to employ nuclear weapons in response to the employment of nuclear and (or) other types of weapons of mass

destruction against itself and (or) its allies, as well as in the event of aggression against the Russian Federation and (or) the Republic of Belarus as participants in the Union State with the employment of conventional weapons, which creates a critical threat to their sovereignty and (or) territorial integrity.

19. The conditions that enable the possibility of nuclear weapons employment by the Russian Federation are as follows:

a) receipt of reliable data on the launch of ballistic missiles attacking the territories of the Russian Federation and (or) its allies;

b) employment of nuclear or other types of weapons of mass destruction by an adversary against the territories of the Russian Federation and (or) its allies, against facilities and (or) military formations of the Russian Federation located outside its territory;

c) actions by an adversary affecting elements of critically important state or military infrastructure of the Russian Federation, the disablement of which would disrupt response actions by nuclear forces;

d) aggression against the Russian Federation and (or) the Republic of Belarus as participants in the Union State with the employment of conventional weapons, which creates a critical threat to their sovereignty and (or) territorial integrity;

e) receipt of reliable data on the massive launch (take-off) of air and space attack means (strategic and tactical aircraft, cruise missiles, unmanned, hypersonic and other aerial vehicles) and their crossing of the state border of the Russian Federation.

20. The decision to employ nuclear weapons is made by the President of the Russian Federation.

21. The President of the Russian Federation may, if necessary, inform the military-political leadership of other states and (or) international organizations about the readiness of the Russian Federation to employ nuclear weapons or of the decision taken to employ nuclear weapons, as well as of the fact of their employment.

IV. Tasks and Functions of Federal Government Authorities, Other Government Bodies and Organizations on the Implementation of State Policy on Nuclear Deterrence

22. The state policy on nuclear deterrence is directed by the President of the Russian Federation.

23. The Government of the Russian Federation takes measures to implement economic policy aimed at maintenance and development of nuclear deterrence means, as well as shapes and implements foreign and information policy in the nuclear deterrence area.

24. The Security Council of the Russian Federation sets the main directions of military policy in the nuclear deterrence area, as well as coordinates the activities of federal executive authorities and organizations involved in the implementation of the decisions by the President of the Russian Federation related to ensuring nuclear deterrence.

25. The Ministry of Defence of the Russian Federation, acting through the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation, directly plans and implements organizational and military activities in the nuclear deterrence area.

26. Other federal executive authorities and organizations participate in the implementation of the decisions by the President of the Russian Federation related to ensuring nuclear deterrence in accordance with their authority.



https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_safety/disarmament/1434131/?lang=en

(Submber : Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation)